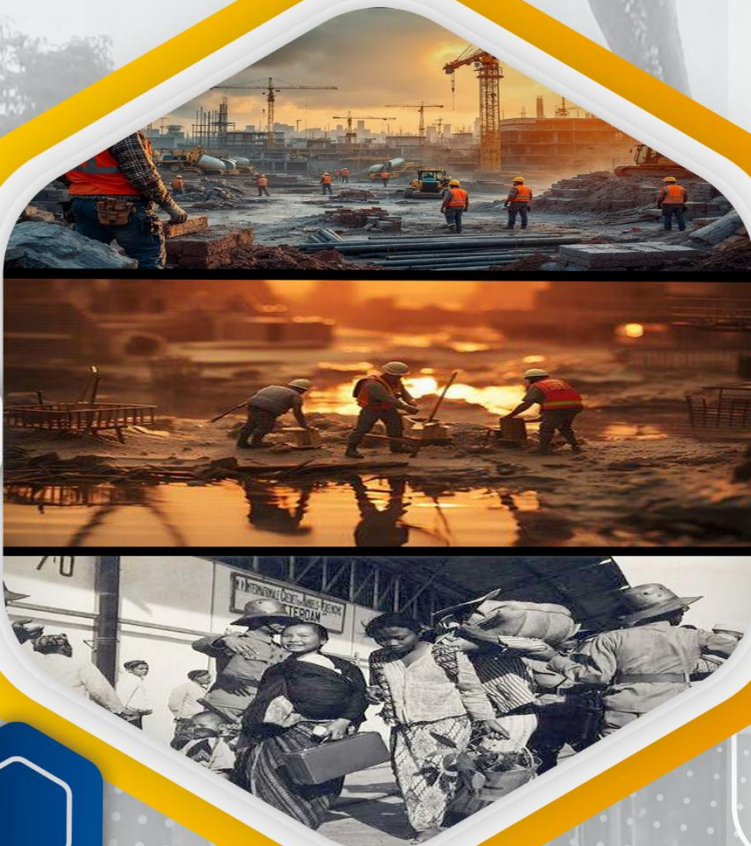




RENCANA STRATEGIS

DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI GORONTALO

TAHUN 2025-2029



RENCANA STRATEGIS





GUBERNUR GORONTALO
KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR **306 / 34 / IX / 2025**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 – 2029
DAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI PROVINSI GORONTALO
GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai amanat Pasal 11, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 105 dan Pasal 108 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah dalam menyusun renstra dan renja Perangkat Daerah dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis dan Tim Penyusun Rencana Kerja yang ditetapkan oleh Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Gorontalo tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2025-2029 dan Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2026 Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

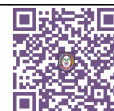
Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3);
8. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Nomor 30).

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 – 2029 DAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2026 DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI PROVINSI GORONTALO.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 dan Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2026 Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. tim penyusun renstra mempunyai tugas:
 1. mengkaji dan mengevaluasi hasil capaian program dan kegiatan urusan Tenaga Kerja berdasarkan rencana strategi tahun 2025-2029;
 2. melakukan identifikasi masalah dan isu strategis urusan Ketenagakerjaan, ESDM dan Transmigrasi;
 3. merumuskan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas, urusan masyarakat, hasil koordinasi dan konsultasi dengan mitra baik Bappeda Provinsi Gorontalo maupun instansi yang menangani urusan Ketenagakerjaan di Kab/Kota;
 4. menelaah rancangan awal RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2025 – 2029;
 5. menetapkan indikator kinerja urusan Ketenagakerjaan tahun 2025 – 2029;
 6. menyelaraskan program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai kewenangan Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo;
 7. menetapkan target kinerja yang harus di capai setiap tahun selama masa Renstra 2025 – 2029; dan
 8. menyusun program dan kegiatan sesuai dengan indikator kinerja yang di tetapkan.
- b. tim penyusun renja mempunyai tugas:
 1. mengkaji dan mengevaluasi hasil capaian program dan kegiatan urusan Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi tahun 2024;
 2. melakukan identifikasi masalah dan isu strategis urusan Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi;
 3. menyusun rancangan awal Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi;
 4. menyelenggarakan Forum Perangkat Daerah kabupaten/kota se provinsi Gorontalo;

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



5. merumuskan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas, urusan masyarakat, hasil forum Perangkat Daerah dan hasil jaring aspirasi masyarakat dan DPRD Provinsi Gorontalo;
6. menelaah rancangan RPJMD Provinsi Gorontalo 2025 – 2029 dan RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2026, menyelaraskan program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai kewenangan;
7. menyusun program dan kegiatan sesuai dengan pagu indikatif dan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu; dan
8. menyusun rancangan akhir Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2026.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 17 September 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :
GUBERNUR GORONTALO



GUSNAR ISMAIL

yang diterbitkan oleh BSrE.

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo
2. Masing-masing yang bersangkutan

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 306/34/ IX /2025
TANGGAL 17 SEPTEMBER 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
STRATEGIS TAHUN 2025 – 2029 DAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA TAHUN 2026 DINAS TENAGA KERJA,
ESDM DAN TRANSMIGRASI PROVINSI GORONTALO

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN

A. KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 – 2029

- I. Ketua : Kepala Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo
- II. Sekretaris : Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo
- III. Anggota :
- a. Tim Penyusun Bagian Sekretariat:
Koordinator : Elies Andita, SS (Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan)
Anggota : 1. Iwinarty Limonu, SE (Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan)
2. Pelaksana Bagian Sekretariat
- b. Tim Penyusun Bidang Ketenagakerjaan:
Koordinator : Sabaruddin Daeng Mario, SH (Kepala Bidang)
Anggota : 1. Mastina Djakani, SH (Kepala Seksi Pelatihan Vokasi dan Produktivitas)
2. Rini Anggraini Bungi, S.Pt (Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan)
3. Gudwer Ismail Nasaru, SH (Fungsional Mediator)
- c. Tim Penyusun Bidang Energi Sumber Daya Mineral:
Koordinator : Abd. Rakhmat Dangkoa, ST (Kepala Bidang)
Anggota : 1. Nasution, ST (Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan)
2. Minarni T. Podungge, ST (Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan)
3. Aziz S. Ayuba, A.Md, ST (Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan)
4. Zainal Ramdan Faried, ST,M.Si (Fungsional Analisis Kebijakan)
5. Tresya Yasin, ST (Fungsional Penyelidik Bumi)

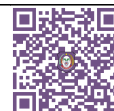
Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



- d. Tim Penyusun Bidang Transmigrasi:
 Koordinator : Budiyanto Rahim, SE (Plt. Kepala Bidang)
 Anggota : Sayipul Mooduto, SE (Analisis Kawasan Transmigrasi)
- e. Tim Penyusun UPTD Balai Latihan Kerja:
 Koordinator : Edwing Hulopi, SE (Kepala UPTD)
 Anggota : 1. Ayu Triana Ila, S.PI, M.Ec.Dev (Kepala SUB Bagian Tata Usaha)
 2. Yulianto Utiahman, S.Sos (Kepala Seksi Pelatihan Tenaga Kerja)
 3. Haspin Saleh Abaidata, S.Pd (Kepala Seksi Pengembangan Produktivitas)
- f. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo
 1. Unsur pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 2. Unsur pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

B. KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2026

- I. Ketua : Kepala Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo
- II. Sekretaris : Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo
- III. Anggota :
 - a. Tim Penyusun Bagian Sekretariat:
 Koordinator : Elies Andita, SS (Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan)
 Anggota : 1. Iwinarty Limonu, SE (Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan)
 2. Pelaksana Bagian Sekretariat
 - b. Tim Penyusun Bidang Ketenagakerjaan:
 Koordinator : Sabaruddin Daeng Mario, SH (Kepala Bidang)
 Anggota : 1. Mastina Djakani, SH (Kepala Seksi Pelatihan Vokasi dan Produktivitas)
 2. Mohamad Yodi Panto Biludi, SH (Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan)
 3. Rita Hulopi, SH (Fungsional Mediator)

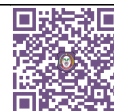
Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



- c. Tim Penyusun Bidang Energi Sumber Daya Mineral:
 Koordinator : Abd. Rakhmat Dangkoa, ST (Kepala Bidang)
 Anggota : 1. Nasution, ST (Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan)
 2. Minarni T. Podungge, ST (Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan)
 3. Aziz S. Ayuba, A.Md, ST (Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan)
 4. Zainal Ramdan Faried, ST,M.Si (Fungsional Analisis Kebijakan)
 5. Tresya Yasin, ST (Fungsional Penyelidik Bumi)
- d. Tim Penyusun Bidang Transmigrasi:
 Koordinator : Budiyanto Rahim, SE (Plt. Kepala Bidang)
 Anggota : Sayipul Mooduto, SE (Analisis Kawasan Transmigrasi)
- e. Tim Penyusun UPTD Balai Latihan Kerja:
 Koordinator : Edwing Hulopi, SE (Kepala UPTD)
 Anggota : 1. Ayu Triana Ila, S.PI, M.Ec.Dev (Kepala SUB Bagian Tata Usaha)
 2. Yulianto Utiahman, S.Sos (Kepala Seksi Pelatihan Tenaga Kerja)
 3. Haspin Saleh Abaidata, S.Pd (Kepala Seksi Pengembangan Produktivitas)
- f. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo
1. Unsur pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 2. Unsur pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam



Ditandatangani secara elektronik oleh :
GUBERNUR GORONTALO



GUSNAR ISMAIL

yang diterbitkan oleh BSrE.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan izin-Nya penyusunan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo tahun 2025 – 2029 ini dapat diselesaikan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo untuk 5 (Lima) tahun ke depan, yang berisi upaya-upaya pembangunan urusan ketenagakerjaan, energi sumber daya mineral dan ketransmigrasian yang dijabarkan dalam bentuk program/kegiatan/sub kegiatan, indikator, target, sampai dengan kerangka kelembangan, kerangka regulasi dan kerangka pendanaannya.

Renstra ini disusun sebagai bentuk penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029. Selain itu penyusunan renstra ini juga memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025, tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 serta Surat Edaran Gubernur Gorontalo Nomor 050/Bappedda/489/V/2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029. Renstra Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 ini digunakan sebagai acuan pada proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan urusan ketenagakerjaan, energi sumber daya mineral dan ketransmigrasian dalam kurun waktu 2025-2029.

Mengingat hal tersebut, maka Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo harus melaksanakannya secara akuntabel dan berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*). Untuk mendukung keberhasilan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra, akan dilakukan evaluasi dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, termasuk indikator-indikator kinerjanya.





Semoga penyusunan dan penerbitan Renstra Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 ini mendapatkan ridha Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Amin.

Gorontalo, Juni 2025

Kepala Dinas
Tenaga Kerja ESDM dan Transmigrasi
Provinsi Gorontalo



Drs. Wardoyo Mansur Pongoliu, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19690524 198902 1 002





DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	I – 1
1.2. Landasan Hukum	I – 2
1.3. Maksud dan Tujuan	I – 5
1.4. Sistematika Penulisan	I – 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	II – 1
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	II – 31

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra Tahun 2025-2029	III – 1
3.2. Sasaran Renstra Tahun 2025-2029	III – 3
3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029	III – 8
3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029	III – 11

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

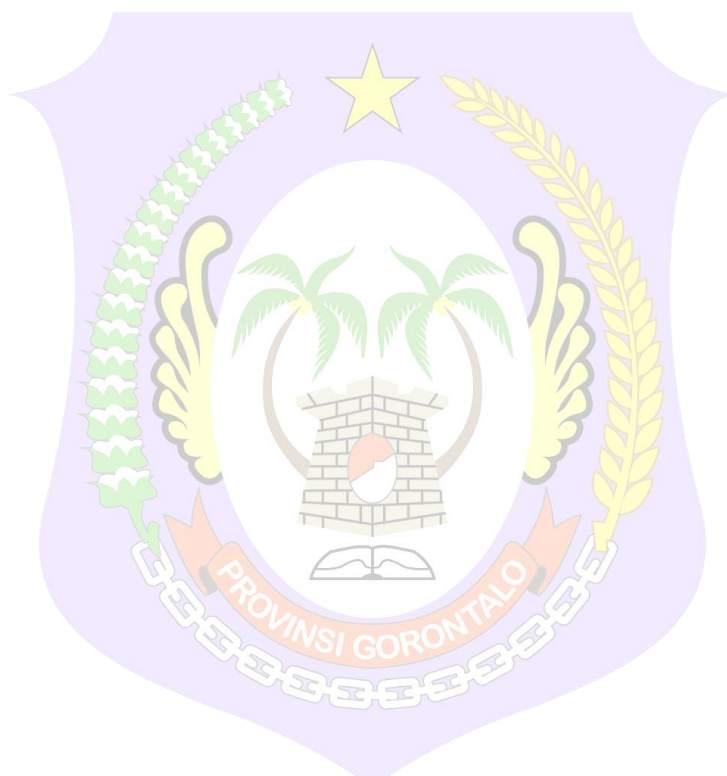
4.1. Program Renstra Tahun 2025-2029	IV – 1
--	--------





4.2.	Kegiatan Renstra Tahun 2025-2029	IV – 7
4.3.	Subkegiatan Renstra Tahun 2025-2029	IV – 9
4.4.	Subkegiatan yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	IV – 51
4.5.	Indikator Kinerja Utama	IV – 52
4.6.	Indikator Kinerja Kunci	IV – 53

BAB V PENUTUP





DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Jumlah Aparatur Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi menurut komposisi Bidang	II – 11
Tabel 2.2.	Jumlah Aparatur Dinas menurut Jabatan	II – 12
Tabel 2.3.	Jumlah Aparatur Dinas menurut Pangkat	II – 13
Tabel 2.4.	Jumlah Aparatur menurut Penjenjangan Struktural (Diklatpim II, III dan IV)	II – 15
Tabel 2.5.	Jumlah Aparatur Dinas menurut Jenjang Pendidikan	II – 15
Tabel 2.6.	Data Aset Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi	II – 17
Tabel 2.7.	Alokasi APBD pada SKPD DTK-ESDMT Provinsi Gorontalo Selang Tahun 2023-2024	II – 19
Tabel 2.8.	Pemasangan Instalasi Listrik Gratis bagi Rumah Tangga Sasaran	II – 21
Tabel 2.9.	Beban SHM di Lokasi Transmigrasi	II – 22
Tabel 2.10.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo	II – 23
Tabel 2.11.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo	II – 25
Tabel 2.12.	Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo	II – 32
Tabel 3.1.	Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029	III – 6
Tabel 3.2.	Penetapan Renstra Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo	III – 9
Tabel 3.3.	Rumusan Arah Kebijakan Renstra Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo	III – 13
Tabel 4.1.	Program Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029	IV – 4





Tabel 4.2. Rumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo	IV – 10
Tabel 4.3. Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2025 – 2029	IV – 25
Tabel 4.4. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Daerah	IV – 51
Tabel 4.5. Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo	IV – 53
Tabel 4.6. Indikator Kinerja Kunci Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo	IV – 54





DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo	II – 2
Gambar 2.2.	Struktur Organisasi UPTD Balai Latihan Kerja Provinsi Gorontalo	II – 9
Gambar 2.3.	Grafik Jumlah Aparatur Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi menurut komposisi bidang	II – 11
Gambar 2.4.	Grafik Jumlah Aparatur Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi menurut Jabatan	II – 13
Gambar 2.5.	Grafik Jumlah Aparatur Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi menurut Pangkat	II – 14
Gambar 2.6.	Diagram Jumlah Aparatur Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi menurut Penjurangan Struktural	II – 15
Gambar 2.7.	Diagram Jumlah Aparatur Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi menurut Jenjang Pendidikan	II – 16
Gambar 2.8.	Diagram Alokasi APBD pada SKPD DTK-ESDMT Provinsi Gorontalo Selang Tahun 2023-2024	II – 19
Gambar 2.9.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Gorontalo	II – 20
Gambar 2.10.	Upah Minimum Provinsi (UMP)	II – 20





BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah merupakan Dokumen Perencanaan Menengah Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD dalam mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan. Rencana strategis (RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dengan berpedoman pada Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Selain itu Penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2025 – 2029 juga memperhatikan kebijakan dan prioritas program Pemerintah Provinsi Gorontalo, serta dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik di bidang ketenagakerjaan, energi sumber daya mineral dan ketransmigrasian di





Provinsi Gorontalo yang disusun dengan pertimbangan potensi sumberdaya, memperhatikan faktor-faktor keberhasilan, hambatan, evaluasi kinerja dan isu-isu strategis yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, energi sumber daya mineral dan ketransmigrasian.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029 Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut :

- (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- (2) Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo;
- (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
- (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- (5) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2003 Tentang Panas Bumi;
- (6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- (7) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- (8) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);





- (9) Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Air Tanah;
- (10) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682);
- (11) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
- (12) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- (13) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
- (14) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
- (15) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara
- (16) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- (17) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
- (18) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah;
- (19) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi;
- (20) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- (21) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- (22) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (23) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan PMI;
- (24) Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 – 2029.





- (25) Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- (26) Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- (27) Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029;
- (28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- (29) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (30) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri;
- (31) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- (32) Instruksi Menteri Dalam negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- (33) Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Daerah;
- (34) Surat Edaran Gubernur Gorontalo Nomor 050/Bappeda/489/V/2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.





1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ini dimaksudkan untuk memberikan arah kebijakan dan strategi bagi Dinas Tenaga Kerja, ESDM, dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 2025–2029. Renstra ini menjadi acuan dalam perencanaan program dan kegiatan agar sejalan dengan visi dan misi Gubernur serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo.

Tujuan disusunnya Renstra Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 adalah:

1. Memperoleh dokumen rencana pembangunan bidang ketenagakerjaan, energi sumber daya mineral dan ketransmigrasian periode 2025 -2029 yang terintegrasi dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 serta dokumen perencanaan lainnya yang berhubungan dengan urusan ketenagakerjaan, energi sumber daya mineral dan ketransmigrasian.
2. Memberikan arah dan acuan pembangunan yang ingin dicapai Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo dalam kurun waktu 2025 -2029 yang diwujudkan dengan pencapaian berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan.
3. Memberikan pedoman bagi Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo dalam menjabarkan tujuan dan sasaran dan arah pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :





- Bab I ***Pendahuluan***, berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.
- Bab II ***Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah***, berisi Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat daerah, Sumberdaya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, kelompok Sasaran Layanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
- Bab III ***Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan***, berisi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah serta Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah
- Bab IV ***Program, kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan***, berisi rencana program, kegiatan, sub kegiatan beserta indikator kinerja, target dan pagu indikatif
- Bab V ***Penutup***, berisi Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.





BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

a. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

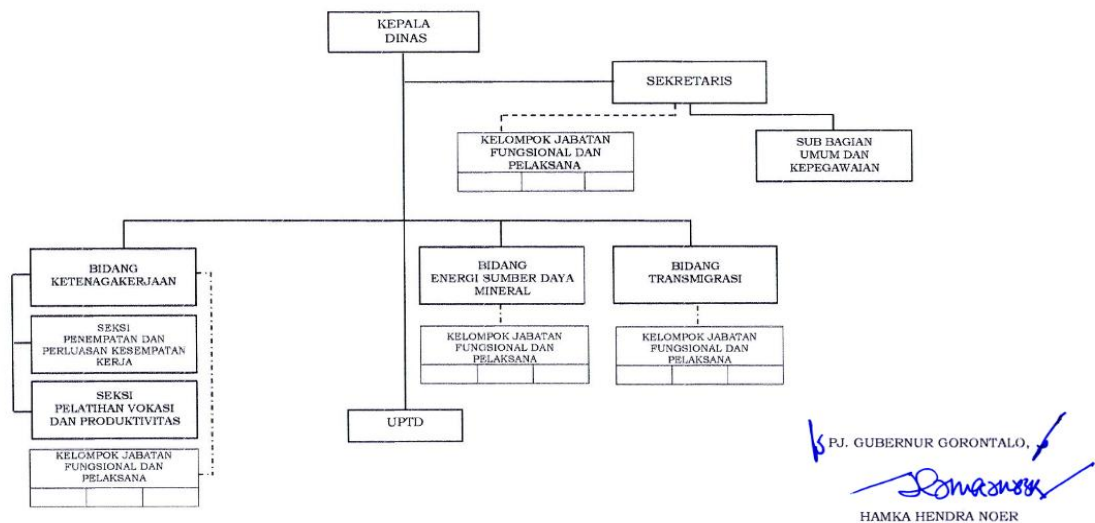
Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo terbentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah. Tugas Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Tenaga Kerja, Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan perencanaan, pelaksanaan, pengaturan, fasilitasi, koordinasi serta penetapan kebijakan teknis bidang Tenaga Kerja, Energi sumber daya mineral dan Transmigrasi;
- b. pengendalian atas pelaksanaan kegiatan Tenaga Kerja, Energi sumber daya mineral dan Transmigrasi;
- c. pemantauan dan evaluasi Program bidang Tenaga Kerja, Energi sumber daya mineral dan Transmigrasi;
- d. pembinaan administrasi kepegawaian, pembiayaan dan perlengkapan dilingkungan Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi.





Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo memiliki dapat dicermati pada bagan sebagai berikut:



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo

Berdasarkan dari gambar diatas, Struktur Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo terdiri atas Kepala Dinas dibantu oleh 5 (Lima) pejabat Administrator (3 Kepala Bidang, 1 Sekretaris dan 1 Kepala UPTD), dan kelompok pejabat fungsional. Salah satu tantangan yang dihadapi dalam periode Rencana Strategis ini adalah adanya kekosongan jabatan pada level Administrator maupun fungsional, yang berdampak langsung terhadap efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan organisasi. Sampai dengan awal periode Renstra ini, tercatat masih terdapat kekosongan pada jabatan Administrator, yaitu :

- Sekretaris
- Kepala Bidang Transmigrasi

Selain kekosongan pada jabatan Administrator, juga terdapat kekosongan pada beberapa jabatan fungsional yang sangat vital dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kerja





organisasi. Jabatan fungsional yang mengalami kekosongan antara lain :

- Fungsional Perencana
- Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah
- Fungsional Pengantar Kerja

Kekosongan jabatan tersebut berpotensi menurunkan kinerja unit organisasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, upaya yang telah dilakukan adalah dengan mengusulkan pejabat pelaksana tugas pada jabatan Administrator dan untuk jabatan fungsional telah dilakukan pengusulan kebutuhan jabatan fungsional tersebut.

Uraian Tugas dan Fungsi adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dalam bidang tenaga kerja, energi sumber daya mineral, transmigrasi dan tenaga kerja yang berada dibawah tanggungjawab Gubernur.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan dinas maupun dengan instansi terkait sesuai tugas masing-masing;
- b. mengikuti, memenuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada gubernur serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi-fungsi dinas kepada Gubernur;
- c. memberikan saran-saran atau pertimbangan kepada gubernur mengenai langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- d. menyusun program/rencana teknis tahunan menurut bidang tugas;





- e. mengadakan pembinaan dan peningkatan SDM dilingkungan pegawai Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi;
- f. melaksanakan Pengendalian atas pelaksanaan Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi;
- g. menganalisa dan membuat laporan serta melaksanakan penilaian pelaksanaan tugas dilingkungan Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi.
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan perencanaan, evaluasi, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan, pelayanan administrasi, kehumasan, umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pengendalian serta penyusunan laporan;
- b. pengelolaan administrasi keuangan dan urusan rumah tangga;
- c. pengelolaan umum dan kepegawaian;
- d. penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
- e. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan Dinas secara berkala;
- f. melaksanakan fungsi lain sesuai bidang tugasnya

Sekretaris dibantu oleh 1 orang pejabat Pengawas (sub bagian) yaitu Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta 2 (dua) orang Pejabat Fungsional yaitu Pejabat fungsional Perencana dan fungsional analisis keuangan pusat dan daerah serta pelaksana.

3. Bidang Energi Sumber Daya Mineral

Bidang Energi Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, program





kerja, norma, standar, prosedur, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang Energi Sumber Daya Mineral.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Energi Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penyusunan program kerja, norma, standar, prosedur dibidang Energi Sumber Daya Mineral;
- b. pelaksanaan kebijakan dan program kerja, norma, standar, prosedur di bidang Energi Sumber Daya Mineral;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan perusahaan dan pengembangan bidang Energi Sumber Daya Mineral serta Pembinaan dan pengawasan kegiatan minyak dan konservasi energi;
- d. pelayanan data dan sistem informasi bidang Energi Sumber Daya Mineral;
- e. pemberian layanan kajian dan rekomendasi teknis izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL), izin operasi pembangkit listrik dan penerbitan izin pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia, dan informatika yang izinnnya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi serta Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas pemegang saham dalam negeri;
- f. pemberian kajian dan rekomendasi teknis Persetujuan harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik dan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi;
- g. pengembangan listrik perdesaan melalui pemanfaatan potensi energi baru terbarukan;
- h. penyediaan energi listrik bagi kelompok masyarakat tidak mampu;
- i. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan dibidang energi sumber daya mineral;





- j. pemberian masukan, telaahan, saran serta pertimbangan-pertimbangan kepada kepala dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas di lingkup bidang;
- k. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya

Bidang Energi sumber daya mineral dibantu oleh 3 (tiga) orang pejabat fungsional Inspektur Ketenagalistrikan, 1 (satu) orang Fungsional penyelidik bumi dan 1 (satu) orang fungsional Analisis Kebijakan.

4. Bidang Ketenagakerjaan

Bidang Ketenagakerjaan mempunyai tugas di bidang Ketenagakerjaan, Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (PTK-PKK), Hubungan Industrial (HI) serta Pengawasan Norma Kerja dan Norma K3.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Promosi informasi pasar kerja dalam pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- b. Koordinasi penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- c. Koordinasi perantaraan kerja dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- d. Promosi informasi pasar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja di dalam dan di luar negeri (dalam hubungan kerja dan di luar hubungan kerja);
- e. Koordinasi penyiapan sarana dan prasarana terkait penyebarluasan informasi syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada pemerintah daerah kabupaten/kota;





- f. Koordinasi penyiapan sarana dan prasarana untuk melakukan pelayanan Pengesahan RPTKA perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah TKA, dan lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- g. Koordinasi pemantauan dan evaluasi hasil pengesahan RPTKA perpanjangan;
- h. Verifikasi pengesahan peraturan perusahaan (PP) dan pendaftaran perjanjian kerja bersama (BKP) daerah provinsi;
- i. Koordinasi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian bersama;
- j. Koordinasi pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan, pelaksanaan mogok kerja, dan penutupan perusahaan;
- k. Koordinasi pembentukan dan pemberdayaan Lembaga Kerja Sama Bipartit di perusahaan;
- l. Pemberian fasilitasi dan/ atau mediasi terhadap potensi perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan;
- m. Koordinasi pembinaan, penyuluhan bimbingan dan monitoring hubungan industrial;
- n. Koordinasi penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMPS), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK); dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Bidang Ketenagakerjaan dibantu oleh 2 orang eselon IV (seksi) dan kelompok jabatan fungsional yang terdiri dari:

- a. Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
- b. Seksi Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
- c. Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan
- d. Fungsional Mediator Hubungan Industrial





5. Bidang Transmigrasi

Bidang Transmigrasi mempunyai tugas di bidang Transmigrasi.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

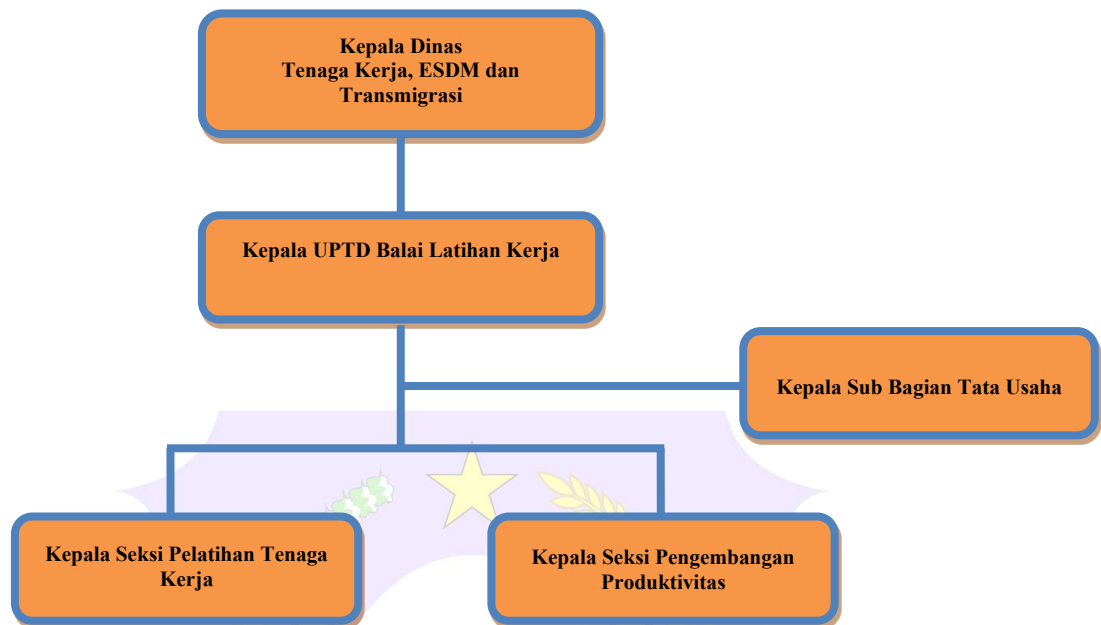
- a. Pembinaan usaha ekonomi sosial budaya, penempatan dan kerjasama serta penyiapan areal, sarana dan prasarana transmigrasi;
- b. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi sosial budaya warga transmigrasi;
- c. Memfasilitasi proses penyiapan legalitas areal pertanahan, pembentukan pokja kawasan transmigrasi;
- d. Melakukan sosialisasi dan distribusi peraturan ketransmigrasian ke kabupaten;
- e. Melaksanakan rapat koordinasi evaluasi legalitas lahan dengan sektor terkait;
- f. Melakukan monitoring evaluasi pembangunan permukiman transmigrasi;
- g. Melaksanakan peningkatan kapasitas bagi warga transmigrasi;
- h. Melaksanakan penajakan kerja sama dengan pihak swasta di bidang ketransmigrasian;
- i. Menyampaikan laporan pelaksanaan program dan kegiatan triwulan, semester dan tahunan;
- j. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja dibantu oleh kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.





UPTD BALAI LATIHAN KERJA DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI PROVINSI GORONTALO



Gambar 2.2 Struktur Organisasi UPTD Balai Latihan Kerja Provinsi Gorontalo

Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis di bidang pelatihan keterampilan tenaga kerja dan pengembangan produktivitas.

Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD Balai Latihan Kerja menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kerja di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja;
- b. penyelenggaraan pengkajian dan pengembangan jenis-jenis program, model pelaksanaan pembelajaran pelatihan serta peningkatan keterampilan tenaga kerja berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat, serta pelatihan pengembangan produktivitas;
- c. penyusunan kurikulum pembelajaran dan pelatihan keterampilan tenaga kerja yang berbasis kompetensi dan pelatihan pengembangan produktivitas;





- d. pelaksanaan pelayanan dan penyebarluasan informasi pelatihan kerja dan pengembangan produktivitas;
 - e. pelaksanaan pelatihan keterampilan tenaga kerja dan pelatihan pengembangan produktivitas;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, supervisi dan penilaian penyelenggaraan program-program kegiatan pelatihan tenaga kerja, pengkajian dan analisa kebutuhan pelatihan tenaga kerja dan pengembangan produktivitas.
 - g. pelaksanaan pengkoordinasian uji kompetensi dan sertifikasi tenaga kerja;
 - h. pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana pendukung untuk peningkatan kualitas proses pembelajaran dan pelatihan ketrampilan kerja dan pengembangan produktivitas pada UPTD; dan
 - i. melaksanakan penatausahaan UPTD.
- Bidang UPT Balai Latihan Kerja dibantu oleh 3 orang pejabat pengawas (1 sub bagian dan 2 seksi) dan kelompok jabatan fungsional yang terdiri dari:
- a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pelatihan Tenaga Kerja;
 - c. Seksi Pengembangan Produktivitas;
 - d. Fungsional Instruktur

b. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo didukung oleh Sumber Daya Aparatur. Jumlah aparatur yang terlibat di lingkungan Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo seluruhnya berjumlah 100 orang ASN dan 28 orang Honorer. Ditinjau dari sisi jabatan, maka struktur aparatur di lingkungan Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi terbagi dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional. Profil aparatur di



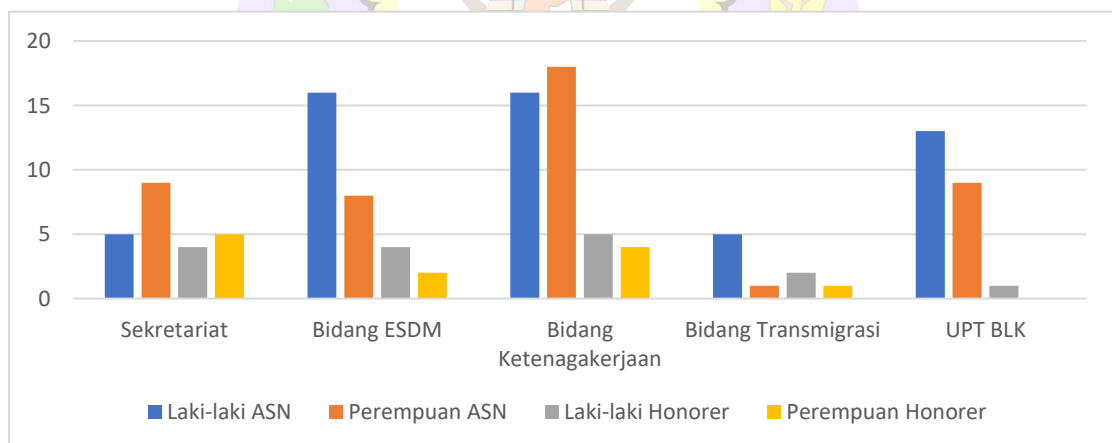


lingkungan Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.
Jumlah Aparatur Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi menurut komposisi Bidang

No	Bidang/Bagian/UPTD	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)		Jumlah Honorer		Disabilitas
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	
1	Sekretariat	5	9	4	5	0
2	Bidang Energi Sumber Daya Mineral	16	8	4	2	0
3	Bidang Ketenagakerjaan	16	18	5	4	0
4	Bidang Transmigrasi	5	1	2	1	0
5	UPT BLK	12	10	1	0	0
Jumlah I		54	46	16	12	0
Jumlah ASN dan Non ASN		100		28		0
Jumlah Keseluruhan				128		

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DTK-ESDMT Provinsi Gorontalo, 2024



Gambar 2.3. Grafik Jumlah Aparatur Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi menurut komposisi bidang

Data Jumlah Aparatur pada dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo menunjukkan bahwa jenis kelamin Perempuan sebanyak 46% Laki-laki sebanyak 54%, dan tenaga Honorer sebanyak 28 orang dengan formasi tenaga honor perempuan





sebanyak 42,86% dan tenaga honorer laki-laki sebanyak 57,14%. Hal tersebut menunjukkan aparatur pada dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo telah memenuhi kesetaraan gender.

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa tidak ada pegawai penyandang disabilitas di Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo.

Dalam memenuhi tupoksi dinas untuk kebutuhan aparatur yang mempunyai keahlian khusus yaitu 27 (dua puluh tujuh) pejabat fungsional yang terdiri dari 2 (dua) mediator dan 11 (sebelas) pengawas ketenagakerjaan pada bidang ketenagakerjaan, 9 (sembilan) instruktur pada UPTD Balai Latihan Kerja, dan 5 (lima) pejabat fungsional pada bidang ESDM.

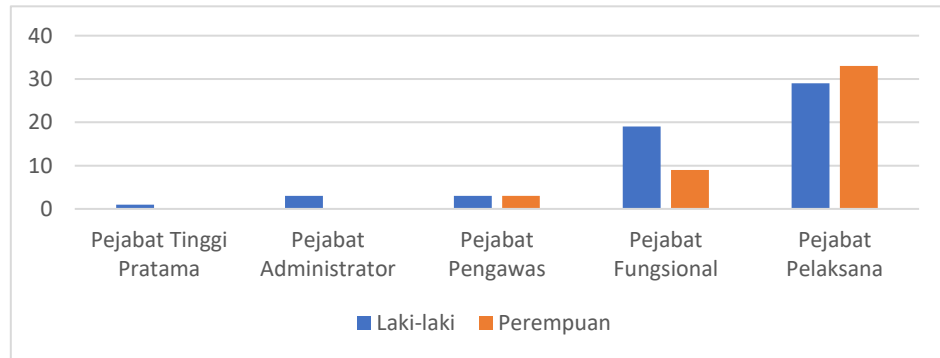
Data jumlah Aparatur dinas menurut jabatan digambarkan dalam tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Jumlah Aparatur Dinas menurut Jabatan

No	Jabatan	Laki-laki	Perempuan
1	Pejabat Tinggi Pratama	1	0
2	Pejabat Administrator	3	0
3	Pejabat Pengawas	2	4
4	Pejabat Fungsional	19	8
5	Pejabat Pelaksana	29	34
Jumlah		54	46
Total		100	

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DTK-ESDMT Provinsi Gorontalo, 2024





Gambar 2.4. Grafik Jumlah Aparatur Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi menurut Jabatan

Data tabel dan grafik di atas menunjukkan bahwa jumlah aparatur menurut jabatan presentase tertinggi adalah pejabat pelaksana sebanyak 63%, pejabat fungsional sebanyak 27%, pejabat pengawas sebanyak 6%, pejabat administrator sebanyak 3% dan pejabat tinggi pratama sebanyak 1%. Hal ini menunjukkan bahwa piramida organisasi dinas sangat ideal dimana pada struktur paling bawah dengan angka tertinggi, ditingkat middle jumlahnya sedang dan ditingkat tertinggi jumlahnya paling kecil.

Data jumlah Aparatur dinas menurut pangkat digambarkan dalam tabel 2.3 sebagai berikut:

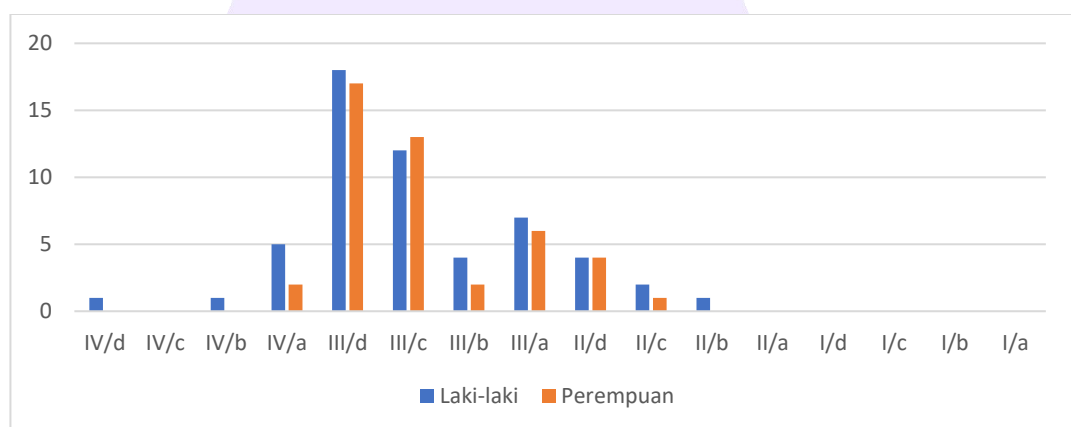
Tabel 2.3

Jumlah Aparatur Dinas menurut Pangkat

NO	PANGKAT	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	IV/d	1	
2	IV/c		
3	IV/b	1	
4	IV/a	5	2
5	III/d	17	18
6	III/c	12	13
7	III/b	4	2
8	III/a	7	6
9	II/d	4	4

NO	PANGKAT	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
10	II/c	2	1
11	II/b	1	
12	II/a		
13	I/d		
14	I/c		
15	I/b		
16	I/a		
Jumlah		54	46
Total		100	

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DTK-ESDMT Provinsi Gorontalo, 2024



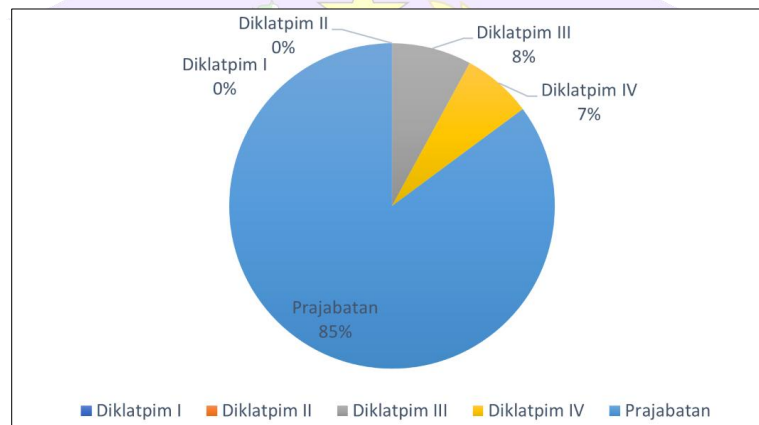
Gambar 2.5. Grafik Jumlah Aparatur Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi menurut Pangkat

Pada tabel dan grafik di atas untuk pangkat aparatur menunjukkan jumlah pangkat/golongan tinggi atau golongan IV persentasenya terbatas sedangkan jumlah persentase tertinggi berada pada struktur pangkat/golongan II dan III. Profil aparatur baik menurut tingkat jabatan atau pangkat/golongan sangat ideal maksudnya di pelaksana dengan presentase tertinggi akan menjadi kekuatan bagi dinas dalam mencapai target kinerja, karena setiap pejabat administrator dalam pencapaian tugas dan fungsi bidang dibantu oleh pejabat pengawas, fungsional dan pelaksana.

Tabel 2.4
Jumlah Aparatur Dinas menurut Penjenjangan Struktural
(Diklatpim II, III dan IV)

No	Penjenjangan Struktural	Laki-Laki	Perempuan
1	Diklatpim I		
2	Diklatpim II		
3	Diklatpim III	6	2
4	Diklatpim IV	3	4
5	Prajabatan	46	40
Jumlah		54	46
Total		100	

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DTK-ESDMT Provinsi Gorontalo, 2024



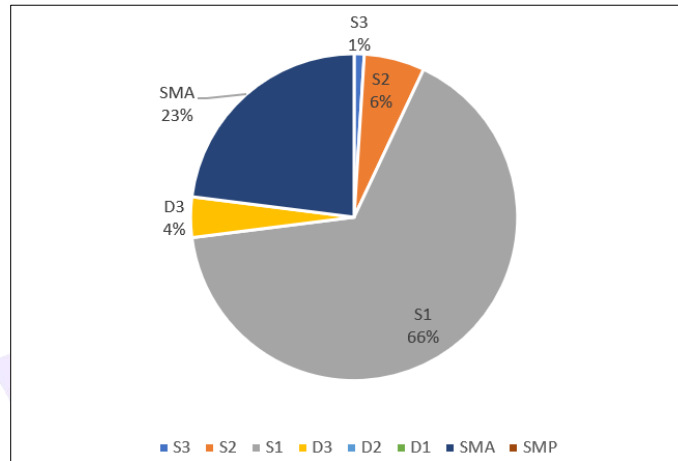
Gambar 2.6. Diagram Jumlah Aparatur Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi menurut Penjenjangan Struktural

Tabel 2.5
Jumlah Aparatur Dinas menurut Jenjang Pendidikan

No	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan
1	S3	1	
2	S2	4	2
3	S1	35	31
4	D3	1	3
5	D2		
6	D1		
7	SMA	13	10
8	SMP		

No	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan
	JUMLAH	54	46
	Total	100	

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DTK-ESDMT Provinsi Gorontalo, 2024



Gambar 2.7. Diagram Jumlah Aparatur Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi menurut Jenjang Pendidikan

Data Jumlah aparatur Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo apabila dilihat jenjang pendidikan, aparatur yang ada di Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo sebesar 66% berpendidikan S1, 6% berpendidikan S2 dan 1% berpendidikan S3. Dengan latar belakang pendidikan S1, S2 dan S3, diharapkan aparatur telah memiliki kemampuan berfikir sistematis untuk pengembangan organisasi.

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Sampai dengan tahun 2025, Dinas Tenaga Kerja ESDM & Transmigrasi Provinsi Gorontalo telah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Walaupun belum memiliki prasarana gedung sendiri namun gedung yang telah disediakan cukup memadai dalam pelaksanaan tugas.



Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja ESDM & Transmigrasi adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6.

Data Aset Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi

No	Nama Barang	Jumlah (Unit)	Kondisi Barang		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Mesin Ketik Elektronik	1	1		
2	Kursi Putar	3	3		
3	AC Unit	6	6		
4	PC Unit	15	11		4
5	Note Book	1	1		
6	Printer	16	13		3
7	Peralatan Personal Kompter Lain-lain	1			1
8	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1			1
9	Perkakas Khusus Lain-lain	1			1
10	Global Positioning System	5	5		
11	Ampere Meter	1			1
12	Mesin Proses Lain-lain	1			1
13	Geolistrik	1	1		
14	Scanner	3	1		2
15	External	2			2
16	Mobil Pick Up	3	1	2	
17	Tanah bangunan Tempat Kerja Lainnya	1	1		
18	Pompa Lain-lain	1			1
19	Note Book	1	1		
20	Bangunan Gedung Pabrik Permanen	2			2





No	Nama Barang	Jumlah (Unit)	Kondisi Barang		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
21	Jalan Desa Lain-lain	1			1
22	Lemari Kayu	2			2
23	Laptop	20	16		4
24	AC Unit	6	6		
25	Televisi	2	1		1
26	Sound System	2	1		1
27	Alat Pemadam Kebakaran Lain-lain	2	2		
28	Proyektor + Attachment	2	2		
29	Organ/Electone	1	1		
30	Meja Kerja Pejabat Ess IV	3			3
31	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1			1
32	Meja Rapat	2	2		
33	Kursi Kerja Pejabat Ess III	1	1		
34	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	71	9		62
35	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Lain-lain	1			1
36	Kursi Sofa	1			1

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DTK-ESDMT Provinsi Gorontalo, 2024

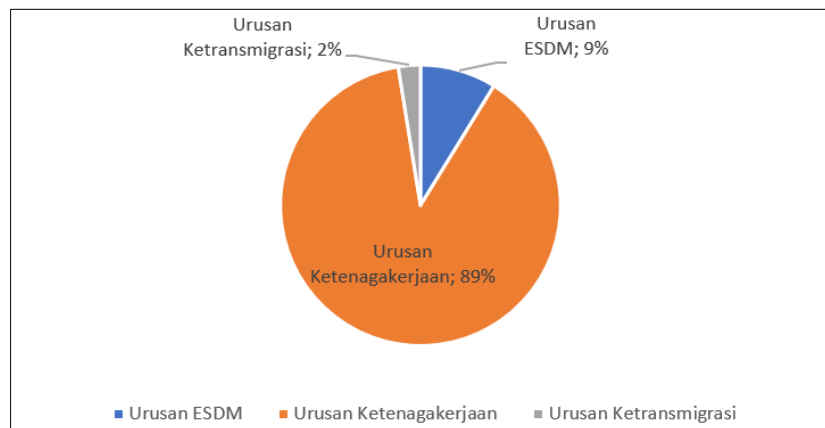
Faktor lain yang sangat menentukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sumber daya anggaran. Sumber Daya Anggaran digunakan sesuai rencana dan prioritas program, menganut proporsi belanja sebagaimana ketentuan Pemerintah Provinsi Gorontalo yaitu 70 : 30 (belanja langsung masyarakat 70 % dan belanja tidak langsung 30%). APBD Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo yang digunakan selang tahun 2023-2024 adalah sebagai berikut:



Tabel 2.7

Alokasi APBD pada SKPD DTK-ESDMT Provinsi Gorontalo Selang Tahun 2023-2024

No	Tahun Anggaran	Urusan ESDM	Urusan Ketenagakerjaan	Urusan Ketransmigrasian
1	2023	2.280.154.100	14.647.795.781	529.630.000
2	2024	754.535.500	15.945.030.243	348.880.000
Total		3.034.689.600	30.592.826.024	878.510.000



Gambar 2.8. Diagram Alokasi APBD pada SKPD DTK-ESDMT Provinsi Gorontalo Selang Tahun 2023-2024

c. Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo

TPT Provinsi Gorontalo berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2024 sebesar 3,13 persen. Selama lima tahun terakhir, terjadi kenaikan TPT saat awal pandemi Covid-19 (Agustus 2020), kemudian TPT menunjukkan tren menurun hingga Agustus 2022 dan sedikit meningkat hingga Agustus 2024. Pada Agustus 2024, TPT mengalami kenaikan sebesar 0,07 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2023.



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2024

Gambar 2.9. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Gorontalo

Dari grafik pencapaian kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tersebut diatas tercatat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Gorontalo mengalami penurunan sebesar 1,15% dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Hal tersebut menggambarkan keberhasilan pelaksanaan program kegiatan di bidang ketenagakerjaan.

Dinas Tenaga Kerja ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo setiap tahunnya pun telah menyusun penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan pencapaian dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Gambar 2.10. Upah Minimum Provinsi (UMP)



Pada grafik diatas tercatat bahwa Upah minimum Provinsi Gorontalo pada tahun 2021 turun sebesar Rp 201.926,- dibandingkan tahun 2020. Hal tersebut merupakan dampak dari Pandemi Covid-19, dimana Kementerian Ketenagakerjaan RI mengeluarkan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/11/HK.04/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) yang memutuskan seluruh Provinsi agar tidak menaikkan besaran UMP. Mulai tahun 2022, Upah Minimum Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Sampai dengan tahun 2025 Upah Minimum Provinsi Gorontalo sebesar Rp 3.221.731,-.

Salah satu pencapaian kinerja yang dilaksanakan bidang Energi Sumber Daya Mineral yaitu terpenuhinya kebutuhan listrik bagi masyarakat tidak mampu. Keberhasilan kinerja tersebut tergambar pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.8

Pemasangan Instalasi Listrik Gratis bagi Rumah Tangga Sasaran

No	Kabupaten/Kota	Tahun Anggaran				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kabupaten Pohuwato	-	24	-	6	
2	Kabupaten Boalemo	-	59	41	45	8
3	Kabupaten Gorontalo Utara	-	16	-	131	29
4	Kabupaten Gorontalo	24	263	311	179	18
5	Kabupaten Bone Bolango	11	71	9	137	8
6	Kota Gorontalo	10	17	14	18	2
Jumlah		45	450	375	516	65
Total s/d tahun 2024		1.451 RTS				

Salah satu pencapaian kinerja yang dilaksanakan bidang Transmigrasi yaitu fasilitasi penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) warga transmigrasi. Keberhasilan kinerja tersebut tergambar pada tabel di bawah ini :



Tabel 2.9
Beban SHM di Lokasi Transmigrasi

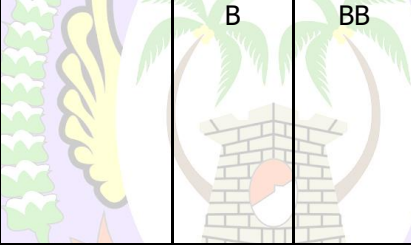
No.	Kabupaten/Satuan Permukiman	Beban SHM (Bidang)		
		Target	Realisasi	Sisa
1.	Kabupaten Gorontalo - UPT Bukit Aren	450	153	297
2.	Kabupaten Boalemo - UPT Pangea SP3	450	172	278
3.	Kabupaten Pohuwato - UPT Sandalan	495	380	115
4.	Kabupaten Gorontalo Utara - UPT Motihelumo	452	158	294

Selain pencapaian diatas, kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel berikut :





Tabel 2.10
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi
Provinsi Gorontalo

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA OPD TAHUN KE-			REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-			RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-		
					2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
SEKRETARIAT													
1	Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo				B	BB	BB	A	BB		115,71%	100%	
URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL													
1	Persentase Jumlah Rumah Tangga terpasang Listrik				33,74%	39,34%	43,87%	34,06%	34,96%		102,16%	87,97%	
2	Persentase bauran energi terbarukan				11,76%	13,58%	15,40%	18,77%	12,35%		18,77%	90,94%	





URUSAN KETENAGAKERJAAN													
1	Persentase peningkatan jumlah serapan tenaga kerja				24,5%	26,5%	27%	62,78%	24,23%		256,24%	91,43%	
2	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan				100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
3	Persentase jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan				3,08%	3,49%	3,9%	3,07%	5,45%		99,68%	156,16%	
URUSAN KETRANSMIGRASIAN													
1	Persentase jumlah masyarakat transmigrasi yang dikembangkan				75,59%	91,34%	94,34%	75,59%	36,22%		100%	39,65%	





Tabel 2.11
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi
Provinsi Gorontalo

No.	Program	Jlh Keg	2023 (Rp.)		2024 (Rp.)		2025 (Rp.)	
			Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Urusan Energi Sumber Daya Mineral								
1	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	1	255.600.000	253.941.985	146.089.300	144.893.099	64.308.000	
2	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	2	364.920.000	364.868.650	105.750.000	105.708.200	144.946.000	
3	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	2	315.434.100	315.084.900	161.960.000	161.919.967	61.460.000	
4	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	2	1.344.200.000	1.203.245.370	397.646.200	392.299.183	245.349.200	





No.	Program	Jlh Keg	2023 (Rp.)		2024 (Rp.)		2025 (Rp.)	
			Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Urusan Ketenagakerjaan								
1	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	3	1.433.200.200	1.317.506.970	549.717.821	542.717.821	268.254.000	
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	1	100.000.300	99.950.033	314.100.350	313.156.040	118.603.500	
3	Program Hubungan Industrial	2	848.676.276	726.093.391	859.016.276	849.203.708	1.101.754.276	
4	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	1	190.660.000	189.871.507	161.960.000	161.941.637	54.034.500	





No.	Program	Jlh Keg	2023 (Rp.)		2024 (Rp.)		2025 (Rp.)	
			Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	5	12.075.259.005	11.007.187.665	13.890.893.617	13.596.156.876	17.075.024.829	
Urusan Ketransmigrasian								
1	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	1	327.470.000	253.941.985	135.360.000	135.110.860	69.500.000	
2	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	1	202.160.000	216.679.580	238.900.000	230.080.790	117.842.000	





d. Kelompok Sasaran Layanan

Dinas Tenaga Kerja, ESDM serta Transmigrasi Provinsi Gorontalo memiliki mandat strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mendorong ketahanan energi, serta mendukung pemerataan pembangunan melalui program transmigrasi.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Tenaga Kerja, ESDM serta Transmigrasi Provinsi Gorontalo melayani berbagai kelompok sasaran yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo.

Kelompok sasaran layanan Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan transmigrasi Provinsi Gorontalo ini mencakup:

1. Pencari Kerja

Masyarakat usia produktif yang sedang mencari kesempatan kerja, baik di dalam maupun luar daerah, menjadi salah satu kelompok utama yang dilayani melalui program pelatihan kerja, pemagangan, penyuluhan ketenagakerjaan, dan bursa kerja.

2. Tenaga Kerja dan Pekerja Migran

Termasuk pekerja formal maupun informal serta calon dan pekerja migran Indonesia (PMI) asal Gorontalo yang mendapat layanan perlindungan, peningkatan keterampilan, serta fasilitasi penempatan dan pemulangan.

3. Dunia Usaha dan Dunia Industri

Perusahaan dan pelaku usaha yang membutuhkan tenaga kerja kompeten dilayani melalui penyediaan data ketenagakerjaan, fasilitasi rekrutmen, dan pelatihan berbasis kebutuhan industri (link and match) serta pengawasan norma ketenagakerjaan pada perusahaan dan pembinaan hubungan industrial.





4. Masyarakat Daerah Transmigrasi dan Calon Transmigran
Warga yang menjadi peserta program transmigrasi, baik yang berasal dari Provinsi Gorontalo maupun dari daerah pengirim, menerima pelayanan berupa pembinaan sosial-ekonomi, penyediaan lahan, dan pendampingan pembangunan wilayah.
5. Masyarakat Umum dan Pemerintah Daerah
Melalui layanan informasi dan kebijakan terkait energi dan sumber daya mineral (ESDM), Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo juga menyasar masyarakat umum dan pemangku kepentingan di sektor energi untuk memastikan pemanfaatan energi yang berkelanjutan dan berkeadilan.
6. Pelaku Usaha Pertambangan dan Energi
Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo memberikan pelayanan perizinan, pengawasan, pembinaan teknis serta pemantauan kegiatan pertambangan rakyat dan energi guna menjamin kegiatan usaha dilakukan sesuai peraturan dan memberi manfaat maksimal bagi daerah

e. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Mitra perangkat daerah memiliki peran penting dalam pemberian pelayanan, baik sebagai penyedia data, fasilitator kebijakan, maupun pendukung operasional di lapangan. Beberapa perangkat daerah yang menjadi mitra strategis Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo antara lain:

1. Tingkat Pemerintah Pusat
 - Kementerian Ketenagakerjaan RI
Pembinaan kebijakan tenaga kerja, pelatihan vokasi, penempatan tenaga kerja, perlindungan pekerja dan pengawasan ketenagakerjaan





- Kementerian ESDM RI
Sinkronisasi kebijakan energi dan sumber daya mineral, termasuk elektrifikasi dan pengawasan tambang
 - Kementerian Transmigrasi RI
Pembinaan program transmigrasi dan pengembangan Kawasan transmigrasi
 - PT PLN (Persero)
Perluasan rasio elektrifikasi
 - BPJS Ketenagakerjaan
Perlindungan jaminan sosial pekerja
2. Tingkat Pemerintah Provinsi
- Bappeda Provinsi Gorontalo
Sinkronisasi perencanaan Pembangunan lintas sektor agar program ketenagakerjaan, ESDM dan transmigrasi masuk dalam prioritas daerah
 - Inspektorat Provinsi Gorontalo
Pengawasan dan pengendalian akuntabilitas program/kegiatan
 - Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo
Perizinan terkait ketenagakerjaan, energi dan pertambangan sesuai kewenangan provinsi
 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo
Mitra utama dalam pengawasan dampak lingkungan sektor tambang
3. Tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota
- Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota
Mitra terdepan dalam penempatan tenaga kerja lokal, pelatihan kerja, dan mediasi hubungan industrial





- Dinas Transmigrasi Kabupaten/Kota
Pelaksanaan langsung program transmigrasi di lapangan, khususnya penempatan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat transmigran di kawasan transmigrasi
- Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan
Pelaksanaan langsung program transmigrasi, pendataan tenaga kerja, serta pemberdayaan masyarakat di lapangan

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan yang efektif, adaptif, dan berbasis permasalahan aktual, diperlukan identifikasi dan analisis terhadap permasalahan dan isu strategis yang dihadapi perangkat daerah. Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo menghadapi dinamika lingkungan strategis baik secara global, nasional, maupun regional, yang berdampak langsung pada pelaksanaan tugas dan fungsi.

Perumusan permasalahan dan isu strategis dilakukan melalui pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial dengan mempertimbangkan indikator kinerja utama, capaian pembangunan daerah, hasil evaluasi kinerja tahun-tahun sebelumnya serta aspirasi masyarakat dan dinamika kebijakan nasional.

Permasalahan dan isu strategis Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel berikut :





Tabel 2.12
Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi
Provinsi Gorontalo

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Urusan Ketenagakerjaan						
1. Ketersediaan Tenaga Kerja Usia Produktif yang Kompeten dan Terampil	Tingkat Pengangguran yang Tinggi terutama di kalangan usia muda dan lulusan baru	Daya saing tenaga kerja	Globalisasi dan Otomatisasi pekerjaan. Perkembangan teknologi dan otomatisasi berdampak pada hilangnya jenis pekerjaan tradisional (misalnya buruh kasar dan pekerjaan rutin).	Kesenjangan keterampilan tenaga kerja	Tingginya angka pengangguran dan Pekerja Rentan.	<ol style="list-style-type: none"> Tingginya angka pengangguran Rendahnya Tingkat partisipasi Angkatan kerja perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya Rendahnya cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan
	Rendahnya Tingkat partisipasi Angkatan kerja perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya					
	Tidak optimalnya implementasi kebijakan afirmasi ketenagakerjaan bagi disabilitas					
2. Pertumbuhan industri, sektor UMKM dan sektor informal yang menyerap tenaga kerja	Kesenjangan kompetensi antara tenaga kerja dengan kebutuhan industry	Kualitas sumber daya manusia				
	Rendahnya cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan					





POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Meningkatnya jumlah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di tempat kerja	Perlindungan social				
	Meningkatnya Perselisihan Hubungan Industrial					
	Meningkatnya pelanggaran di bidang ketenagakerjaan					
	Kurangnya Tenaga Fungsional Ketenagakerjaan					
3. Fasilitas Lembaga Pelatihan Kerja	Terbatasnya akses pelatihan tenaga kerja yang berkualitas					
4. Penyaluran Tenaga Kerja Lokal ke Perusahaan Daerah, Nasional maupun Luar negeri	Kurangnya data dan informasi ketenagakerjaan					
5. Pengembangan wirausaha baru	Masih rendahnya perlindungan kerja informal					
Urusan ESDM						
1. Potensi Energi Surya, Air dan Bio Energi yang bisa dikembangkan secara lokal	Belum optimalnya pemanfaatan energi terbarukan local	Kelangkaan energi	Transisi energi global ke energi terbarukan	Ketergantungan pada energi fosil. Indonesia masih bergantung	Belum meratanya akses listrik bagi Rumah Tangga Miskin	Belum meratanya akses listrik bagi Rumah Tangga Miskin





POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD			
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			
	Kurangnya pemanfaatan energi biomassa			pada batubara dan BBM, dengan kontribusi energi baru terbarukan (EBT) masih di bawah target 23%					
2. Pengembangan pemanfaatan jaringan listrik di daerah terpencil	Belum meratanya akses listrik di daerah terpencil								
3. Pengelolaan Pertambangan rakyat	Eksplorasi tambang ilegal (PETI) yang merusak lingkungan dan tidak memberi kontribusi ekonomi formal			Pertambangan tanpa izin			Permasalahan perizinan tambang dan pertambangan rakyat. Banyak wilayah mengalami konflik lahan, perizinan tumpang tindih, dan maraknya tambang ilegal (PETI)	Maraknya Pertambangan Tanpa Izin (PETI)	Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan pengelolaan pertambangan rakyat
	Kurangnya pengawasan dan regulasi yang tegas terhadap aktivitas pertambangan rakyat								
	Belum tersedianya dokumen pendukung untuk penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)								
4. Potensi mineral bukan logam dan batuan	Minimnya investasi bidang pertambangan non logam dan batuan								
5. Pengelolaan Air Tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT)	Belum terpenuhinya Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (NPA)								





POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Urusan Transmigrasi						
1. Lahan Usaha warga transmigrasi	Masih banyak lahan usaha warga transmigrasi yang belum bersertifikat	Belum optimalnya infrastruktur ekonomi	Pembangunan berbasis keberlanjutan. Trend global mendorong pembangunan permukiman berbasis keberlanjutan.	Ketidaksesuaian sosial budaya dan konflik lahan	Belum optimalnya penyelesaian permasalahan lahan dan penerbitan sertifikat Hak Milik	Belum optimalnya penyelesaian permasalahan lahan dan penerbitan sertifikat Hak Milik
2. Kawasan transmigrasi yang dapat dikembangkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru	Permasalahan infrastruktur di kawasan transmigrasi					
	Kurangnya integrasi sosial antara penduduk asli dan transmigran					
3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi	Ketidaksesuaian program transmigrasi dengan kebutuhan atau potensi local					





Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo merumuskan beberapa isu strategis pada urusan ketenagakerjaan, ESDM dan Transmigrasi sebagaimana berikut :

1. Tingginya angka pengangguran
2. Rendahnya Tingkat partisipasi Angkatan kerja perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya
3. Rendahnya cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan
4. Belum meratanya akses listrik bagi Rumah Tangga Miskin
5. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan pengelolaan pertambangan rakyat
6. Belum optimalnya penyelesaian permasalahan lahan dan penerbitan Sertifikat Hak Milik





BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Renstra Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 mengacu pada Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029, yaitu :

“Gorontalo Maju dan Sejahtera”

Dalam rangka pencapaian visi tersebut, ditetapkan 5 (lima) Misi Pembangunan, yaitu :

1. Mengoptimalkan posisi strategis Gorontalo Terhadap IKN Nusantara untuk akselerasi Pembangunan
2. Melakukan akselerasi agar Gorontalo keluar dari lima provinsi termiskin di Indonesia
3. Menstimulasi program kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan Masyarakat
4. Mewujudkan infrastruktur pelayanan publik yang merata dan berkualitas
5. Menjadikan “Adat Bersendikan Syara, Syara Bersendikan Kitabullah” sebagai spirit pembangunan dan kehidupan masyarakat.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pembangunan Provinsi Gorontalo serta mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil, Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang selaras dengan prioritas Pembangunan daerah dan nasional.

Perumusan ini disusun berdasarkan hasil identifikasi permasalahan dan isu strategis yang berkembang serta mempertimbangkan daya dukung sumber daya daerah, dinamika sosial ekonomi, kebijakan sektoral dan masukan pemangku kepentingan.

3.1 Tujuan Renstra Tahun 2025-2029

Pada Renstra Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 telah dirumuskan 1 (satu) tujuan yang



menggambarkan 3 (tiga) urusan yang diampu yaitu urusan ketenagakerjaan, energi sumber daya mineral dan transmigrasi. Tujuan yang diformulasikan sebagai acuan untuk mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi untuk kurun waktu satu sampai berakhirnya masa renstra Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo tahun 2025-2029 adalah :

"Meningkatkan Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja, Pemanfaatan Potensi Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berkelanjutan serta Penyelenggaraan Transmigrasi yang Terpadu dan Berdaya Saing untuk Mendukung Pembangunan Daerah."

Pencapaian tujuan tersebut dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo terdiri dari:

1. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (%)

Ukuran efisiensi tenaga kerja dalam menghasilkan output atau hasil produksi dalam periode waktu tertentu. Produktivitas mencerminkan seberapa besar kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dan kinerja usaha

Rumus :

$$\frac{\text{PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)}}{\text{Jumlah tenaga kerja}}$$

2. Rasio Elektrifikasi (%)

Persentase jumlah kepala keluarga atau rumah tangga yang telah mendapat akses listrik (baik dari jaringan PLN maupun non-PLN) dibandingkan dengan total jumlah rumah tangga di suatu wilayah

Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga Berlistrik}}{\text{Jumlah Total Rumah Tangga}} \times 100\%$$

3. Persentase Dukungan Kegiatan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan di Kawasan Transmigrasi (%)



Indikator yang mengukur seberapa besar keterlibatan dan kontribusi program/kegiatan dari Pemerintah Daerah yang langsung diarahkan untuk mendukung pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi

Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Kegiatan di Kawasan Transmigrasi}}{\text{Jumlah Total Kegiatan yang direncanakan}} \times 100\%$$

3.2 Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran spesifik dari tujuan yang ingin dicapai. Sasaran Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya jumlah serapan tenaga kerja
2. Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif
3. Meningkatnya ketaatan terhadap pelaksanaan norma ketenagakerjaan
4. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan listrik bagi masyarakat
5. Meningkatnya pengelolaan sumber daya mineral secara optimal
6. Meningkatnya ekonomi pedesaan berbasis potensi lokal dengan pendekatan klaster kawasan strategis

Pencapaian Sasaran dapat diukur dengan Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo terdiri dari:

1. Persentase peningkatan jumlah serapan tenaga kerja

Indikator yang menggambarkan pertumbuhan jumlah orang yang berhasil mendapatkan pekerjaan (terserap di pasar kerja) dalam periode waktu, dibandingkan dengan periode sebelumnya

Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Penempatan tenaga kerja pada tahun } n - (n-1)}{\text{Jumlah Penempatan tenaga kerja pada tahun } (n-1)} \times 100\%$$

2. Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama





Ukuran proporsional dari jumlah kasus perselisihan antara pekerja/buruh dan pengusaha yang berhasil diselesaikan secara damai melalui Perjanjian Bersama (PB), dibandingkan dengan total jumlah perselisihan hubungan industrial yang terjadi dalam periode tertentu

Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah kasus perselisihan HI yang diselesaikan melalui perjanjian bersama}}{\text{Jumlah kasus perselisihan yang dilaporkan pada tahun n}} \times 100\%$$

3. Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan

Indikator yang menunjukkan tingkat kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan hukum dan regulasi ketenagakerjaan yang berlaku

Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah total perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan ketenagakerjaan pada tahun n}}{\text{Jumlah total perusahaan yang terdaftar melalui mekanisme wajib lapor ketenagakerjaan pada tahun n}} \times 100\%$$

4. Jumlah Rumah Tangga Sasaran yang terpenuhi kebutuhan listrik

Jumlah rumah tangga dari kelompok sasaran yang sudah memiliki akses dan penggunaan listrik yang memadai untuk kebutuhan sehari-hari.

Rumus :

$$\text{Jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima manfaat pemasangan instalasi Listrik gratis}$$

5. Persentase Usaha Tambang Sesuai Provinsi Kewenangan yang Tidak Melanggar

Indikator yang mengukur proporsi perusahaan atau usaha tambang yang beroperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perizinan yang berlaku, tanpa melakukan pelanggaran seperti penambangan ilegal, pelanggaran lingkungan atau ketidakpatuhan administratif





Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah usaha tambang yang sesuai kewenangan Provinsi yang tidak melanggar Peraturan Perundang-Undangan}}{\text{Jumlah usaha tambang sesuai kewenangan Provinsi}} \times 100\%$$

6. Jumlah kawasan transmigrasi yang dikembangkan

Jumlah kawasan transmigrasi yang telah mendapatkan program pembangunan dan pengembangan secara menyeluruh, meliputi aspek infrastruktur, sosial-ekonomi, lingkungan, fasilitas pendukung untuk mendukung keberlangsungan dan kesejahteraan masyarakat transmigran

Rumus :

$$\text{Jumlah Kawasan transmigrasi yang telah mendapatkan program Pembangunan dan pengembangan}$$

Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 dicapai dengan indikator kinerja dan target selang tahun 2025-2029, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :





Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun						
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<ul style="list-style-type: none"> - Terwujudnya kemandirian pangan yang didukung dengan ketahanan energi dan air - Terwujudnya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim - Terwujudnya peningkatan produktivitas perekonomian daerah - Terwujudnya percepatan penuntasan kemiskinan dan meningkatnya cakupan perlindungan 	Meningkatkan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja, pemanfaatan potensi energi dan sumber daya mineral yang berkelanjutan serta penyelenggaraan transmigrasi yang terpadu dan berdaya saing untuk mendukung pembangunan daerah		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	52,12	52,93	53,74	54,54	55,35	56,16	56,97	
			Rasio Elektrifikasi	%	99	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	
			Persentase Dukungan Kegiatan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan di Kawasan Transmigrasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
			1. Meningkatnya jumlah serapan tenaga kerja	Persentase peningkatan jumlah serapan tenaga kerja	%	24,23	24,50	24,75	25	25,25	25,50	25,75
			2. Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama	%	100	100	100	100	100	100	100
			3. Meningkatnya ketaatan terhadap pelaksanaan	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan	%	5,45	5,55	5,65	5,75	5,85	5,95	6,05





NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun					
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
sosial bagi seluruh penduduk Gorontalo secara berkeadilan dan inklusif		norma Ketenagakerjaan	perundangan bidang ketenagakerjaan								
		4. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan listrik bagi masyarakat	Jumlah Rumah Tangga Sasaran yang terpenuhi kebutuhan listrik	RTS	1.451	60	288	288	288	288	288
		5. Meningkatnya pengelolaan sumber daya mineral secara optimal	Persentase Usaha Tambang Sesuai Provinsi Kewenangan yang Tidak Melanggar	%	100	100	100	100	100	100	100
		6. Meningkatnya ekonomi pedesaan berbasis potensi lokal dengan pendekatan klaster kawasan strategis	Jumlah kawasan transmigrasi yang dikembangkan	Kawasan	1	1	1	1	1	1	1





3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Strategi Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran meningkatnya jumlah serapan tenaga kerja

Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui strategi sebagai berikut :

- a. Penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui reformasi pendidikan vokasi dan pelatihan kerja serta sertifikasi kompetensi berbasis SKKNI dan industri
- b. Penciptaan lapangan kerja
- c. Penguatan kewirausahaan dan UMKM
- d. Transformasi digital tenaga kerja (Pelatihan keterampilan digital)

2. Sasaran meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif

Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui strategi sebagai berikut :

- a. Penguatan dialog sosial tripartit
- b. Peningkatan kapasitas lembaga hubungan industrial
- c. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara adil dan cepat
- d. Perlindungan hak-hak pekerja dan kepastian hukum bagi pengusaha
- e. Peningkatan kesadaran hukum dan kepatuhan norma kerja

3. Sasaran meningkatnya ketaatan terhadap pelaksanaan norma ketenagakerjaan

Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui strategi sebagai berikut :

- a. Penguatan fungsi Pengawas Ketenagakerjaan
- b. Peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha dan pekerja
- c. Digitalisasi sistem pengawasan dan pelaporan



- d. Pendampingan perusahaan dalam menerapkan norma ketenagakerjaan
4. Sasaran meningkatnya pemenuhan kebutuhan listrik bagi masyarakat
Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui strategi sebagai berikut :
- Pengembangan energi baru dan terbarukan
 - Optimalisasi pembangkit listrik
 - Pemberian subsidi listrik bagi rumah tangga tidak mampu
5. Sasaran meningkatnya pengelolaan sumber daya mineral secara optimal
Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui strategi sebagai berikut :
- Penguatan tata kelola dan pengawasan pertambangan
 - Pengembangan wilayah berbasis tambang secara berkelanjutan
 - Penerapan prinsip good mining practice dan pelestarian lingkungan
6. Sasaran meningkatnya ekonomi pedesaan berbasis potensi lokal dengan pendekatan klaster kawasan strategis
Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui strategi sebagai berikut :
- Pengembangan potensi unggulan di kawasan transmigrasi
 - Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan transmigrasi
 - Peningkatan kapasitas wirausaha muda transmigran dan pemanfaatan teknologi lokal

Tabel 3.2
Penahapan Renstra Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi
Provinsi Gorontalo

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Revitalisasi BLK dan pelatihan berbasis <i>competency-based training</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan vokasi lanjutan sesuai standar industri - Sertifikasi produktivitas berbasis SKKNI 	Program <i>Kaizen & 5R</i> (ringkas, rapi, resik, rawat, rajin) untuk budaya kerja produktif	Program <i>reskilling & upskilling</i> untuk tenaga kerja existing	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi hasil 2026–2029 - Penyusunan Masterplan Produktivitas 2031–2035

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
<ul style="list-style-type: none"> - Kerja sama dengan PLN dan pemerintah daerah untuk prioritas desa tertinggal - Pembangunan jaringan distribusi listrik baru di desa terpencil 	Program penyambungan listrik gratis bagi rumah tangga miskin	Program penyambungan listrik gratis bagi rumah tangga miskin	Program penyambungan listrik gratis bagi rumah tangga miskin	Program penyambungan listrik gratis bagi rumah tangga miskin
Pemetaan kebutuhan dasar kawasan transmigrasi (jalan, listrik, air, pendidikan, kesehatan)	Penguatan Infrastruktur Dasar	Pengembangan Ekonomi Lokal	Pembangunan infrastruktur pengolahan hasil pertanian	Kawasan transmigrasi ditetapkan sebagai pusat pertumbuhan baru daerah
<ul style="list-style-type: none"> - Pemetaan kebutuhan pasar kerja sektor unggulan. - Revitalisasi BLK & kurikulum vokasi berbasis demand. - MoU dengan dunia usaha & program magang. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ekspansi pelatihan & sertifikasi kompetensi. - Job Fair digital & tatap muka. 	<ul style="list-style-type: none"> - Inkubasi wirausaha muda & KUR produktif. - Green jobs & ekonomi digital. - Kolaborasi antarprovinsi supply-demand tenaga kerja. 	<ul style="list-style-type: none"> - Upskilling & reskilling tenaga kerja existing. - Penempatan tenaga kerja terampil luar negeri (G-to-G). - Penguatan UMKM & klaster lokal. 	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi hasil 2026–2029. - Penyusunan Masterplan Serapan Kerja 2031–2035. - Integrasi sistem ketenagakerjaan dengan nasional. - Sertifikasi kompetensi internasional.
<ul style="list-style-type: none"> - Pemetaan rumah tangga miskin/rentan yang belum teraliri listrik - Program penyambungan listrik gratis (subsidi pemasangan) 	Program penyambungan listrik gratis (subsidi pemasangan)	Program penyambungan listrik gratis (subsidi pemasangan)	Program penyambungan listrik gratis (subsidi pemasangan)	Program penyambungan listrik gratis (subsidi pemasangan)
<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Reklamasi Pasca Tambang - Monitoring Pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Reklamasi Pasca Tambang - Monitoring Pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Reklamasi Pasca Tambang - Monitoring Pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Reklamasi Pasca Tambang - Monitoring Pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Reklamasi Pasca Tambang - Monitoring Pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
wilayah pertambangan - Verifikasi Izin Usaha Pertambangan	wilayah pertambangan - Verifikasi Izin Usaha Pertambangan	wilayah pertambangan - Verifikasi Izin Usaha Pertambangan	wilayah pertambangan - Verifikasi Izin Usaha Pertambangan	wilayah pertambangan - Verifikasi Izin Usaha Pertambangan

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran meningkatnya jumlah serapan tenaga kerja

Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Optimalisasi Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi
- b. Peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja
- c. Perluasan akses penempatan tenaga kerja
- d. Kemitraan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri
- e. Penguatan sistem informasi pasar kerja
- f. Perlindungan tenaga kerja dan pekerja migran

2. Sasaran meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif

Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Penguatan kelembagaan hubungan industrial
- b. Perlindungan hak pekerja dan fleksibilitas usaha secara seimbang melalui pelaksanaan UU ketenagakerjaan dan UU cipta kerja secara harmonis
- c. Mendorong perusahaan untuk memiliki PKB melalui dialog bipartit
- d. Digitalisasi layanan ketenagakerjaan

3. Sasaran meningkatnya ketaatan terhadap pelaksanaan norma ketenagakerjaan



Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Revitalisasi dan reformasi pengawasan ketenagakerjaan
- b. Penguatan koordinasi antar lembaga
- c. Fasilitasi pelaksanaan audit ketenagakerjaan secara mandiri
- d. Pemberian sanksi tegas dan penghargaan sebagai insentif kepatuhan
- e. Penyediaan layanan konsultasi ketenagakerjaan
- f. Penguatan sistem pelaporan online ketenagakerjaan

4. Sasaran meningkatnya pemenuhan kebutuhan listrik bagi masyarakat

Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Pemerataan akses listrik hingga ke desa dan daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar)
- b. Peningkatan pengelolaan energi baru terbarukan dan konservasi energi
- c. Peningkatan koordinasi pusat-daerah dan lembaga terkait

5. Sasaran meningkatnya pengelolaan sumber daya mineral secara optimal

Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Peningkatan kepatuhan dan pengawasan terhadap usaha pertambangan
- b. Pengembangan kawasan industri berbasis tambang
- c. Peningkatan pendataan dan pemetaan zona konservasi Cekungan Air Tanah
- d. Penguatan sinergi pusat dan daerah dalam pengelolaan tambang

6. Sasaran meningkatnya ekonomi pedesaan berbasis potensi lokal dengan pendekatan klaster kawasan strategis

Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Sinergi program Organisasi Perangkat Daerah Lintas sektor dalam penguatan ekonomi kawasan transmigrasi
- b. Penguatan dan pembinaan warga transmigrasi



- c. Fasilitasi penyelesaian permasalahan lahan warga transmigrasi
- d. Revitalisasi sarana dan prasarana masyarakat di lokasi transmigrasi
- e. Monitoring dan evaluasi pembangunan ekonomi di kawasan transmigrasi secara terpadu

Tabel 3.3

Rumusan Arah Kebijakan Renstra Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terwujudnya peningkatan produktivitas perekonomian daerah	Pelaksanaan afirmasi reskilling dan upskilling bagi angkatan kerja, terutama di bidang pariwisata, pertanian, perikanan, dan industri pengolahan.	<ol style="list-style-type: none"> a. Optimalisasi Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dan Vokasi b. Peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja c. Perluasan akses penempatan tenaga kerja d. Kemitraan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri e. Penguatan sistem informasi pasar kerja f. Perlindungan tenaga kerja dan pekerja migran g. Revitalisasi dan reformasi pengawasan ketenagakerjaan h. Penguatan koordinasi antar lembaga i. Fasilitasi pelaksanaan audit ketenagakerjaan secara mandiri j. Pemberian sanksi tegas dan penghargaan sebagai insentif kepatuhan k. Penyediaan layanan konsultasi ketenagakerjaan l. Penguatan sistem pelaporan online ketenagakerjaan m. Sinergi program Organisasi Perangkat Daerah Lintas sektor dalam penguatan ekonomi kawasan transmigrasi 	

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<ul style="list-style-type: none"> n. Penguatan dan pembinaan warga transmigrasi o. Fasilitasi penyelesaian permasalahan lahan warga transmigrasi p. Revitalisasi sarana dan prasarana masyarakat di lokasi transmigrasi q. Monitoring dan evaluasi pembangunan ekonomi di kawasan transmigrasi secara terpadu 	
2.	Terwujudnya kemandirian pangan yang didukung dengan ketahanan energi dan air	Meningkatkan ketersediaan energi baru terbarukan seperti PLTMH, PLTS, Biogas dgn memperhatikan potensi dan daya dukung lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemerataan akses listrik hingga ke desa dan daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) b. Peningkatan pengelolaan energi baru terbarukan dan konservasi energi c. Peningkatan koordinasi pusat-daerah dan lembaga terkait 	
3.	Terwujudnya percepatan penuntasan kemiskinan dan meningkatnya cakupan perlindungan sosial bagi seluruh penduduk Gorontalo secara berkeadilan dan inklusif	<ul style="list-style-type: none"> -Memastikan lingkungan yang inklusif, termasuk perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan pemenuhan hak bagi penduduk kelompok rentan seperti perempuan kepala keluarga, lansia, dan disabilitas -Peningkatan kapasitas keluarga miskin, terutama yang memiliki anak, penyandang disabilitas, dan/atau lansia -Peningkatan cakupan jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penguatan kelembagaan hubungan industrial b. Perlindungan hak pekerja dan fleksibilitas usaha secara seimbang melalui pelaksanaan UU ketenagakerjaan dan UU cipta kerja secara harmonis c. Mendorong perusahaan untuk memiliki PKB melalui dialog bipartit d. Digitalisasi layanan ketenagakerjaan 	
4.	Terwujudnya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Pengendalian rencana tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, dan wilayah jelajah satwa spesies dilindungi	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kepatuhan dan pengawasan terhadap usaha pertambangan b. Pengembangan kawasan industri berbasis tambang c. Peningkatan pendataan dan pemetaan zona konservasi Cekungan Air Tanah 	

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			d. Penguatan sinergi pusat dan daerah dalam pengelolaan tambang	



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah ke dalam bentuk intervensi yang lebih operasional, Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo menyusun program, kegiatan, dan subkegiatan secara sistematis, terukur dan berbasis hasil (outcome). Proses perumusan dilakukan dengan mempertimbangkan hasil analisis kebutuhan, prioritas pembangunan nasional dan daerah, ketersediaan sumber daya, serta keterlibatan pemangku kepentingan.

Perumusan ini diarahkan untuk memastikan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan Dinas, serta mendukung pencapaian kinerja pembangunan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

4.1. Program Renstra Tahun 2025-2029

Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, serta menjawab tantangan dan isu strategis yang berkembang secara global, nasional dan regional, Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo merumuskan 12 (dua belas) program.

Program-program tersebut dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo sebagaimana tabel di bawah ini :

No.	Tujuan / Sasaran	Program
1.	Meningkatkan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja, pemanfaatan potensi energi dan sumber daya mineral yang berkelanjutan serta penyelenggaraan transmigrasi yang terpadu dan berdaya saing untuk mendukung pembangunan Daerah	

No.	Tujuan / Sasaran	Program
1.1.	Meningkatnya jumlah serapan tenaga kerja	Program Perencanaan Tenaga Kerja
		Program Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
		Program Penempatan Tenaga Kerja
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
1.2.	Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif	Program Hubungan Industrial
1.3.	Meningkatnya ketaatan terhadap pelaksanaan norma ketenagakerjaan	Program Pengawasan Ketenagakerjaan
1.4.	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan listrik bagi masyarakat	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
		Program Pengelolaan Energi Terbarukan
1.5.	Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Mineral secara optimal	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian
		Program Pengelolaan Mineral dan Batubara
1.6.	Meningkatnya ekonomi pedesaan berbasis potensi lokal dengan pendekatan klaster kawasan strategis	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
		Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Program-program tersebut dikelompokkan berdasarkan 3 (tiga) urusan utama, sebagai berikut :

a. Urusan Ketenagakerjaan sebanyak 5 (lima) program

1. Program Perencanaan Tenaga Kerja
2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
3. Program Penempatan Tenaga Kerja
4. Program Hubungan Industrial
5. Program Pengawasan Ketenagakerjaan

b. Urusan ESDM sebanyak 4 (empat) program

1. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian
2. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara
3. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan



4. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
- c. Urusan Transmigrasi sebanyak 2 (dua) program
 1. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
 2. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi
- d. Program Penunjang sebanyak 1 (satu) program
 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi merumuskan program-program yang dijabarkan dalam target yang terukur dan disertai dengan estimasi alokasi anggaran yang realistis sebagaimana tergambar pada tabel di bawah ini :





Tabel 4.1

Program Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					17.486.273.000,00		24.087.016.950,00		24.307.016.950,00		24.527.016.950,00		24.752.016.950,00	
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					15.743.873.000,00		18.397.541.174,00		18.607.541.174,00		18.817.541.174,00		19.032.541.174,00	
Meningkatnya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	100	100	15.743.873.000,00	100	18.397.541.174,00	100	18.607.541.174,00	100	18.817.541.174,00	100	19.032.541.174,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					-		275.000.000,00		275.000.000,00		275.000.000,00		275.000.000,00	
Terkelolanya Informasi Tenaga Kerja	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja (%)	16.67	0	-	-	33.33	275.000.000,00	66.66	275.000.000,00	100	275.000.000,00	100	275.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					432.212.000,00		1.850.000.000,00		1.860.000.000,00		1.870.000.000,00		1.880.000.000,00	
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan dalam negeri hasil pelatihan kerja (%)	36.77	50	50	432.212.000,00	50	1.850.000.000,00	50	1.860.000.000,00	50	1.870.000.000,00	50	1.880.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					253.000.000,00		1.297.139.500,00		1.297.139.500,00		1.297.139.500,00		1.297.139.500,00	
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase)	55.60	55.60	55.60	253.000.000,00	55.60	1.297.139.500,00	55.60	1.297.139.500,00	55.60	1.297.139.500,00	55.60	1.297.139.500,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja





BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					957.188.000,00		1.647.336.276,00		1.647.336.276,00		1.647.336.276,00		1.647.336.276,00	
Meningkatnya Pekerja yang Terlindungi	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (Orang)	20.969	21.169	21.369	957.188.000,00	21.569	1.647.336.276,00	21.769	1.647.336.276,00	21.969	1.647.336.276,00	22.169	1.647.336.276,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.06 - PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN					100.000.000,00		620.000.000,00		620.000.000,00		620.000.000,00		620.000.000,00	
Terlindungnya hak-hak pekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya (Orang)	20.969	21.169	21.369	100.000.000,00	21.569	620.000.000,00	21.769	620.000.000,00	21.969	620.000.000,00	22.169	620.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					554.667.000,00		3.519.800.000,00		3.523.600.000,00		3.657.400.000,00		3.781.200.000,00	
3.29.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN					67.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		780.000.000,00		800.000.000,00	
Meningkatnya Tata Kelola Kegeologian	Luas Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota (Meter)	715	0	59	67.000.000,00	35	750.000.000,00	75	750.000.000,00	433	780.000.000,00	112	800.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral
3.29.03 - PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA					90.000.000,00		800.000.000,00		850.000.000,00		900.000.000,00		950.000.000,00	
Meningkatnya Tata Kelola Mineral dan Batubara	Jumlah Rekomendasi terhadap Usulan IPR (Unit)	0	0	10	90.000.000,00	10	800.000.000,00	10	850.000.000,00	10	900.000.000,00	10	950.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral
3.29.05 - PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN					85.280.000,00		885.000.000,00		790.000.000,00		795.000.000,00		800.000.000,00	





BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya tata kelola energi baru terbarukan	Porsi EBT dalam Bauran Energi (%)	12.35	13.58	15.4	85.280.000,00	16.38	885.000.000,00	17.39	790.000.000,00	18.34	795.000.000,00	19.32	800.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral
3.29.06 - PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN					312.387.000,00		1.084.800.000,00		1.133.600.000,00		1.182.400.000,00		1.231.200.000,00	
Meningkatnya Cakupan Pelayanan Kelistrikan	Persentase jumlah Rumah tangga sasaran yang mendapat sambungan listrik (%)	49.17	51.20	60.96	312.387.000,00	70.72	1.084.800.000,00	80.48	1.133.600.000,00	90.24	1.182.400.000,00	100	1.231.200.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					200.000.000,00		375.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00	
3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					100.000.000,00		175.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	
Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang (Persentase)	0	0	14.85	100.000.000,00	35.9	175.000.000,00	47.48	200.000.000,00	78.78	200.000.000,00	100	200.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Transmigrasi
3.32.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI					100.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	
Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan (Persentase)	0	0	18.87	100.000.000,00	37.74	200.000.000,00	61.01	200.000.000,00	79.25	200.000.000,00	100	200.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Transmigrasi
TOTAL KESELURUHAN					18.240.940.000,00		27.981.816.950,00		28.230.616.950,00		28.584.416.950,00		28.933.216.950,00	





4.2. Kegiatan Renstra Tahun 2025-2029

Perumusan kegiatan merupakan tahapan penting dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan menterjemahkan program ke dalam bentuk intervensi langsung dan terukur. Dalam konteks pelaksanaan urusan ketenagakerjaan, ESDM, dan transmigrasi, 31 kegiatan berikut disusun untuk mempercepat pencapaian sasaran, meningkatkan pelayanan publik serta mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif di Provinsi Gorontalo.


PROGRAM/KEGIATAN	
Urusan Ketenagakerjaan	
2.07.02	Program Perencanaan Tenaga Kerja
2.07.02.1.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
2.07.03	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
2.07.03.1.03	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah
2.07.03.1.04	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja
2.07.04.1.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2.07.04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
2.07.04.1.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi
2.07.05	Program Hubungan Industrial
2.07.05.1.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota
2.07.05.1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi
2.07.05.1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)
2.07.06	Program Pengawasan Ketenagakerjaan





2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan
Urusan ESDM	
3.29.02	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian
3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
3.29.03	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara
3.29.03.1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil
3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
3.29.03.1.04	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat
3.29.05	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan
3.29.05.1.01	Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil Diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan
3.29.05.1.03	Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun
3.29.05.1.05	Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi
3.29.05.1.07	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi
3.29.05.1.08	Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi
3.29.05.1.10	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi
3.29.06	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan



3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
3.29.06.1.05	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri
3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
Urusan Transmigrasi	
3.32.03	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
3.32.03.1.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3.32.04	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi
3.32.04.1.01	Pengembangan  Satuan Permukiman pada Tahap Pematapan

4.3. Subkegiatan Renstra Tahun 2025-2029

Perumusan subkegiatan merupakan tahapan teknis dalam perencanaan pembangunan daerah yang sifat operasional dan terukur. Subkegiatan disusun untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan secara lebih rinci dengan tujuan menghasilkan output langsung ke masyarakat atau menjadi dasar pencapaian outcome pembangunan.

Subkegiatan dirumuskan dengan memperhatikan hasil cascading dari sasaran daerah ke sasaran perangkat daerah, sebagaimana tabel di bawah ini

:



Tabel 4.2
Rumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan
Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)		
2.07.3.29.3.32.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi									
<ul style="list-style-type: none"> - Terwujudnya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim - Terwujudnya kemandirian pangan yang didukung dengan ketahanan energi dan air - Terwujudnya peningkatan produktivitas perekonomian daerah - Terwujudnya percepatan penuntasan kemiskinan dan meningkatnya cakupan perlindungan social bagi seluruh penduduk Gorontalo secara berkeadilan dan inklusif 	Meningkatkan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja, pemanfaatan potensi energi dan sumber daya mineral yang berkelanjutan serta penyelenggaraan transmigrasi yang terpadu dan berdaya saing untuk mendukung pembangunan daerah				Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja				
					Rasio Elektrifikasi				
					Persentase Dukungan Kegiatan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan di Kawasan Transmigrasi				
				Meningkatnya Jumlah Serapan Tenaga Kerja			Persentase peningkatan jumlah serapan tenaga kerja		
				Meningkatnya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan			Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
					Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.07.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.07.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			





NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.07.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.07.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.07.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.07.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.07.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.07.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2.07.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2.07.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.07.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.07.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.07.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	





NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.07.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Terkelolanya Informasi Tenaga Kerja		Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	
				Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	2.07.02.1.01 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	
					Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	2.07.02.1.01.0001 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	
			Meningkatnya produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan kerja		Persentase tenaga kerja yang ditempatkan dalam negeri hasil pelatihan kerja	2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
				Terlaksananya latihan kerja berdasarkan kluster kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	2.07.03.1.01 - Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi	
					Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	2.07.03.1.01.0001 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi	
				Terlaksananya konsultasi produktivitas pada perusahaan menengah	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	2.07.03.1.03 - Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	
					Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	2.07.03.1.03.0001 - Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	
				Terlaksananya pengukuran produktivitas tingkat daerah provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	2.07.03.1.04 - Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	2.07.03.1.04.0001 - Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	





NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya penempatan tenaga kerja		Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
				Terlaksananya pelayanan antar kerja lintas daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitas layanan ULD	2.07.04.1.01 - Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	2.07.04.1.01 - Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	2.07.04.1.01.0005 - Perluasan Kesempatan Kerja	
					Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitas layanan ULD	2.07.04.1.01.0006 - Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	
				Terlaksananya pengelolaan informasi pasar kerja	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	2.07.04.1.03 - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	
					Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	2.07.04.1.03 - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	
					Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	2.07.04.1.03.0002 - Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	
					Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	2.07.04.1.03.0003 - Job Fair/Bursa Kerja	
				Terlaksananya perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di daerah provinsi	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	2.07.04.1.04 - Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	
					Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	2.07.04.1.04.0001 - Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	





NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif			Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama		
			Meningkatnya Pekerja yang Terlindungi		Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
				Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online	2.07.05.1.01 - Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online	2.07.05.1.01.0001 - Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial	
				Terlaksananya pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	2.07.05.1.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	2.07.05.1.02.0002 - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	
				Terlaksananya penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP	2.07.05.1.03 - Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	





NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	2.07.05.1.03 - Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	
					Jumlah Penetapan UMP	2.07.05.1.03.0001 - Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	
					Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	2.07.05.1.03.0005 - Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	
		Meningkatnya ketaatan terhadap pelaksanaan norma ketenagakerjaan			Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan		
			Terlindunginya hak-hak pekerja		Jumlah Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya	2.07.06 - PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	
				Terselenggaranya pengawasan ketenagakerjaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	2.07.06.1.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	
					Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	2.07.06.1.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	
					Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	2.07.06.1.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	
					Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	2.07.06.1.01.0001 - Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	





NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	2.07.06.1.01.0002 - Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	
					Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	2.07.06.1.01.0003 - Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan listrik bagi masyarakat			Jumlah Rumah Tangga Sasaran yang terpenuhi kebutuhan listrik		
			Meningkatnya tata kelola energi baru terbarukan		Porsi EBT dalam Bauran Energi	3.29.05 - PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	
				Terlaksananya Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas dan/atau Ke Arah Perairan Kepulauan	3.29.05.1.01 - Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil Diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan	
					Jumlah Dokumen rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas dan/atau Ke Arah Perairan Kepulauan	3.29.05.1.01.0002 - Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan	





NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel)	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	3.29.05.1.03 - Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	
					Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	3.29.05.1.03.0002 - Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	
				Tersedianya Data Potensi Biomassa	jumlah dokumen data potensi biomassa	3.29.05.1.05 - Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi	
					jumlah dokumen data potensi biomassa	3.29.05.1.05.0001 - Penyusunan dan pemuktahiran data potensi biomassa	
				Terlaksananya Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Jumlah dokumen data potensi aneka EBT di daerah	3.29.05.1.07 - Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	
					Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	3.29.05.1.07 - Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	
					Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	3.29.05.1.07.0002 - Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	





NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah dokumen data potensi aneka EBT di daerah	3.29.05.1.07.0010 - Penyusunan dan pemutakhiran data potensi aneka EBT di daerah	
				Terlaksananya Pengelolaan Konservasi Energi	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	3.29.05.1.08 - Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	
					Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	3.29.05.1.08.0005 - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	
				Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	3.29.05.1.10 - Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi	
					Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	3.29.05.1.10.0002 - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	
			Meningkatnya Cakupan Pelayanan Kelistrikan		Persentase jumlah Rumah tangga sasaran yang mendapat sambungan listrik	3.29.06 - PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	
				Terlaksananya penatausahaan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi	Jumlah Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi yang Ditetapkan	3.29.06.1.02 - Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	
					Jumlah Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi yang Ditetapkan	3.29.06.1.02.0001 - Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	





NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik	Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	3.29.06.1.05 - Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	
					Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	3.29.06.1.05.0002 - Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	
				Terlaksananya Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	3.29.06.1.06 - Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	
					Jumlah Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	3.29.06.1.06.0002 - Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	
		Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Mineral secara optimal			Persentase Usaha Tambang Sesuai Provinsi Kewenangan yang Tidak Melanggar		
			Meningkatnya Tata Kelola Kegeologian		Luas Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota	3.29.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	
				Tersedianya Data Zona Konservasi Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	3.29.02.1.01 - Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	





NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	3.29.02.1.01 - Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	
					Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi	3.29.02.1.01 - Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	3.29.02.1.01.0001 - Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	
					Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi	3.29.02.1.01.0002 - Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	3.29.02.1.01.0003 - Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	
				Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	3.29.02.1.03 - Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	3.29.02.1.03.0003 - Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	
			Meningkatnya Tata Kelola Mineral dan Batubara		Jumlah Rekomendasi terhadap Usulan IPR	3.29.03 - PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	





NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	3.29.03.1.01 - Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	
				Terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	3.29.03.1.01.0003 - Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	
				Terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	3.29.03.1.03 - Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	
				Terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	3.29.03.1.03.0003 - Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	





NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah Dokumen Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat	3.29.03.1.04 - Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	
					Jumlah Dokumen Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat	3.29.03.1.04.0010 - Penyusunan Dokumen Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat	
		Meningkatnya ekonomi pedesaan berbasis potensi lokal dengan pendekatan klaster kawasan strategis			Jumlah kawasan transmigrasi yang dikembangkan		
			Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi		Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang	3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	
				Terlaksananya penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.32.03.1.01 - Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.32.03.1.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
			Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi		Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan	3.32.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	
				Terlaksananya Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	3.32.04.1.01 - Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	





NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	3.32.04.1.01.0002 - Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman	





Untuk mencapai target kinerja Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo, pada Renstra Tahun 2025-2029 telah disusun program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan secara bertahap dari tahun 2025 sampai dengan 2030. Tahun 2030 memiliki posisi strategis, bukan hanya sebagai lanjutan program sebelumnya akan tetapi juga sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan. Target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2030 dirancang sebagai pijakan awal dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) pada tahun tersebut serta menjadi fondasi transisi menuju kebijakan dan rencana pembangunan jangka menengah daerah berikutnya.

Berikut rencana program, kegiatan, subkegiatan dan pendanaan pada Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :





Tabel 4.3

Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KET
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					17.486.273.000,00		24.087.016.950,00		24.307.016.950,00		24.527.016.950,00		24.752.016.950,00		
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					15.743.873.000,00		18.397.541.174,00		18.607.541.174,00		18.817.541.174,00		19.032.541.174,00		
Meningkatnya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	15.743.873.000,00	100	18.397.541.174,00	100	18.607.541.174,00	100	18.817.541.174,00	100	19.032.541.174,00	2.07.3.29.3.3 2.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi	
2.07.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					245.293.000,00		535.000.000,00		545.000.000,00		555.000.000,00		570.000.000,00		
Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	245.293.000,00	2	535.000.000,00	2	545.000.000,00	2	555.000.000,00	2	570.000.000,00		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	4		4		4		4		4			
2.07.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					153.284.000,00		280.000.000,00		285.000.000,00		290.000.000,00		300.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	153.284.000,00	2	280.000.000,00	2	285.000.000,00	2	290.000.000,00	2	300.000.000,00		
2.07.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					92.009.000,00		255.000.000,00		260.000.000,00		265.000.000,00		270.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	4	92.009.000,00	4	255.000.000,00	4	260.000.000,00	4	265.000.000,00	4	270.000.000,00		





BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.07.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					12.548.442.400,00		13.792.541.174,00		13.992.541.174,00		14.192.541.174,00		14.392.541.174,00		
Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	100	100	12.548.442.400,00	100	13.792.541.174,00	100	13.992.541.174,00	100	14.192.541.174,00	100	14.392.541.174,00		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1		1		1		1		1			
2.07.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					12.488.442.400,00		13.692.541.174,00		13.892.541.174,00		14.092.541.174,00		14.292.541.174,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	100	100	12.488.442.400,00	100	13.692.541.174,00	100	13.892.541.174,00	100	14.092.541.174,00	100	14.292.541.174,00		
2.07.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					60.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	60.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
2.07.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					-		170.000.000,00		170.000.000,00		170.000.000,00		170.000.000,00		
Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	20	0	-	20	170.000.000,00	20	170.000.000,00	20	170.000.000,00	20	170.000.000,00		
2.07.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					-		170.000.000,00		170.000.000,00		170.000.000,00		170.000.000,00		





BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	20	0	-	20	170.000.000,00	20	170.000.000,00	20	170.000.000,00	20	170.000.000,00		
2.07.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					959.368.000,00		1.900.000.000,00		1.900.000.000,00		1.900.000.000,00		1.900.000.000,00		
Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	20	20	959.368.000,00	20	1.900.000.000,00	20	1.900.000.000,00	20	1.900.000.000,00	20	1.900.000.000,00		
2.07.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					959.368.000,00		1.900.000.000,00		1.900.000.000,00		1.900.000.000,00		1.900.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	20	20	959.368.000,00	20	1.900.000.000,00	20	1.900.000.000,00	20	1.900.000.000,00	20	1.900.000.000,00		
2.07.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.990.769.600,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		
Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	1.990.769.600,00	1	2.000.000.000,00	1	2.000.000.000,00	1	2.000.000.000,00	1	2.000.000.000,00		
2.07.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					1.990.769.600,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	1.990.769.600,00	1	2.000.000.000,00	1	2.000.000.000,00	1	2.000.000.000,00	1	2.000.000.000,00		
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					-		275.000.000,00		275.000.000,00		275.000.000,00		275.000.000,00		
Terkelolanya Informasi Tenaga Kerja	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	%	16.67	-	-	33.33	275.000.000,00	66.66	275.000.000,00	100	275.000.000,00	100	275.000.000,00	2.07.3.29.3.3 2.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi	





BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.07.02.1.01 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)					-		275.000.000,00		275.000.000,00		275.000.000,00		275.000.000,00		
Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokumen	1	0	-	2	275.000.000,00	4	275.000.000,00	6	275.000.000,00	6	275.000.000,00		
2.07.02.1.01.0001 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro					-		275.000.000,00		275.000.000,00		275.000.000,00		275.000.000,00		
Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokumen	1	0	-	2	275.000.000,00	4	275.000.000,00	6	275.000.000,00	6	275.000.000,00		
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					432.212.000,00		1.850.000.000,00		1.860.000.000,00		1.870.000.000,00		1.880.000.000,00		
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan dalam negeri hasil pelatihan kerja	%	36.77	50	432.212.000,00	50	1.850.000.000,00	50	1.860.000.000,00	50	1.870.000.000,00	50	1.880.000.000,00	2.07.3.29.3.3 2.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi	
2.07.03.1.01 - Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi					432.212.000,00		1.650.000.000,00		1.660.000.000,00		1.670.000.000,00		1.680.000.000,00		
Terlaksananya latihan kerja berdasarkan kluster kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	80	155	432.212.000,00	220	1.650.000.000,00	220	1.660.000.000,00	220	1.670.000.000,00	220	1.680.000.000,00		
2.07.03.1.01.0001 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi					432.212.000,00		1.650.000.000,00		1.660.000.000,00		1.670.000.000,00		1.680.000.000,00		
Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	80	155	432.212.000,00	220	1.650.000.000,00	220	1.660.000.000,00	220	1.670.000.000,00	220	1.680.000.000,00		
2.07.03.1.03 - Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah					-		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		





BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Terlaksananya konsultasi produktivitas pada perusahaan menengah	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Perusahaan	0	0	-	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00		
2.07.03.1.03.0001 - Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah					-		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Perusahaan	0	0	-	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00		
2.07.03.1.04 - Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi					-		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya pengukuran produktivitas tingkat daerah provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	Dokumen	0	0	-	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
2.07.03.1.04.0001 - Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja					-		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	Dokumen	0	0	-	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA							253.000.000,00		1.297.139.500,00		1.297.139.500,00		1.297.139.500,00		
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	%	55.60	55.60		55.60	253.000.000,00	55.60	1.297.139.500,00	55.60	1.297.139.500,00	55.60	1.297.139.500,00	2.07.3.29.3.3 2.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi	





BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.07.04.1.01 - Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota					130.000.000,00		258.500.000,00		258.500.000,00		258.500.000,00		258.500.000,00		
Terlaksananya pelayanan antar kerja lintas daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD	Orang	0	300	130.000.000,00	300	258.500.000,00	300	258.500.000,00	300	258.500.000,00	300	258.500.000,00		
	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	0	0		32		32		32		32			
2.07.04.1.01.0005 - Perluasan Kesempatan Kerja					-		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	0	0	-	32	150.000.000,00	32	150.000.000,00	32	150.000.000,00	32	150.000.000,00		
2.07.04.1.01.0006 - Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan					130.000.000,00		108.500.000,00		108.500.000,00		108.500.000,00		108.500.000,00		
Terselenggaranya Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD	Orang	0	300	130.000.000,00	300	108.500.000,00	300	108.500.000,00	300	108.500.000,00	300	108.500.000,00		
2.07.04.1.03 - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja					123.000.000,00		479.139.500,00		479.139.500,00		479.139.500,00		479.139.500,00		
Terlaksananya pengelolaan informasi pasar kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang	0	0	123.000.000,00	100	479.139.500,00	100	479.139.500,00	100	479.139.500,00	100	479.139.500,00		
	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	Orang	12903	12903		12903		12903		12903		12903			





BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.07.04.1.03.0002 - Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online					123.000.000,00		195.210.500,00		195.210.500,00		195.210.500,00		195.210.500,00		
Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Melalui sistem online (KarirHub)	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Online Melalui Sistem Online (KarirHub)	Orang	12903	12903	123.000.000,00	12903	195.210.500,00	12903	195.210.500,00	12903	195.210.500,00	12903	195.210.500,00		
2.07.04.1.03.0003 - Job Fair/Bursa Kerja					-		283.929.000,00		283.929.000,00		283.929.000,00		283.929.000,00		
Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang	0	0	-	100	283.929.000,00	100	283.929.000,00	100	283.929.000,00	100	283.929.000,00		
2.07.04.1.04 - Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi					-		559.500.000,00		559.500.000,00		559.500.000,00		559.500.000,00		
Terlaksananya perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di daerah provinsi	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	0	0	-	25	559.500.000,00	25	559.500.000,00	25	559.500.000,00	25	559.500.000,00		
2.07.04.1.04.0001 - Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)					-		559.500.000,00		559.500.000,00		559.500.000,00		559.500.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	0	0	-	25	559.500.000,00	25	559.500.000,00	25	559.500.000,00	25	559.500.000,00		
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					957.188.000,00		1.647.336.276,00		1.647.336.276,00		1.647.336.276,00		1.647.336.276,00		





BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatnya Pekerja yang Terlindungi	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	Orang	20.969	21.369	957.188.000,00	21.569	1.647.336.276,00	21.769	1.647.336.276,00	21.969	1.647.336.276,00	22.169	1.647.336.276,00	2.07.3.29.3.3 2.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi	
2.07.05.1.01 - Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota					-		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online	Perusahaan	135	0	-	145	100.000.000,00	155	100.000.000,00	165	100.000.000,00	175	100.000.000,00		
2.07.05.1.01.0001 - Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial					-		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait Dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online	Perusahaan	135	0	-	145	100.000.000,00	155	100.000.000,00	165	100.000.000,00	175	100.000.000,00		
2.07.05.1.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi					100.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Perkara	5	5	100.000.000,00	5	200.000.000,00	5	200.000.000,00	5	200.000.000,00	5	200.000.000,00		





BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.07.05.1.02.0002 - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi					100.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terselesainya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Perkara	5	5	100.000.000,00	5	200.000.000,00	5	200.000.000,00	5	200.000.000,00	5	200.000.000,00		
2.07.05.1.03 - Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)					857.188.000,00		1.347.336.276,00		1.347.336.276,00		1.347.336.276,00		1.347.336.276,00		
Terlaksananya penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP	Surat Keputusan	1	1	857.188.000,00	1	1.347.336.276,00	1	1.347.336.276,00	1	1.347.336.276,00	1	1.347.336.276,00		
	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Orang	2248	5818		5818		5818		5818		5818			
2.07.05.1.03.0001 - Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)					100.000.000,00		330.000.000,00		330.000.000,00		330.000.000,00		330.000.000,00		
Ditetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP	Surat Keputusan	1	1	100.000.000,00	1	330.000.000,00	1	330.000.000,00	1	330.000.000,00	1	330.000.000,00		
2.07.05.1.03.0005 - Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja					757.188.000,00		1.017.336.276,00		1.017.336.276,00		1.017.336.276,00		1.017.336.276,00		





BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Orang	2248	5818	757.188.000,00	5818	1.017.336.276,00	5818	1.017.336.276,00	5818	1.017.336.276,00	5818	1.017.336.276,00		
2.07.06 - PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN					100.000.000,00		620.000.000,00		620.000.000,00		620.000.000,00		620.000.000,00		
Terlindunginya hak-hak pekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya	Orang	20.969	21.369	100.000.000,00	21.569	620.000.000,00	21.769	620.000.000,00	21.969	620.000.000,00	22.169	620.000.000,00	2.07.3.29.3.3 2.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi	
2.07.06.1.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan					100.000.000,00		620.000.000,00		620.000.000,00		620.000.000,00		620.000.000,00		
Terselenggaranya pengawasan ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	Perusahaan	4.405	4.845	100.000.000,00	5.065	620.000.000,00	5.285	620.000.000,00	5.505	620.000.000,00	5.725	620.000.000,00		
	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	Kasus	0	0		7		6		5		4			
	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	Perusahaan	0	0		35		40		45		50			
2.07.06.1.01.0001 - Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan					100.000.000,00		420.000.000,00		420.000.000,00		420.000.000,00		420.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan dan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	Perusahaan	4.405	4.845	100.000.000,00	5.065	420.000.000,00	5.285	420.000.000,00	5.505	420.000.000,00	5.725	420.000.000,00		





BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET	
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
2.07.06.1.01.0002 - Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan					-		100.000.000,00			100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tertindaknya Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	Kasus	0	0	-	7	100.000.000,00	6	100.000.000,00	5	100.000.000,00	4	100.000.000,00			
2.07.06.1.01.0003 - Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan					-		100.000.000,00			100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tertindaknya Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	Perusahaan	0	0	-	35	100.000.000,00	40	100.000.000,00	45	100.000.000,00	50	100.000.000,00			
3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					554.667.000,00		3.519.800.000,00			3.523.600.000,00		3.657.400.000,00		3.781.200.000,00		
3.29.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLAGIAN					67.000.000,00		750.000.000,00			750.000.000,00		780.000.000,00		800.000.000,00		
Meningkatnya Tata Kelola Kegeologian	Luas Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota	Meter	715	59	67.000.000,00	35	750.000.000,00	75	750.000.000,00	433	780.000.000,00	112	800.000.000,00	2.07.3.29.3.3 2.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi		
3.29.02.1.01 - Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					-		550.000.000,00			550.000.000,00		580.000.000,00		600.000.000,00		
Tersedianya Data Zona Konservasi Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi	Dokumen	2	0	-	1	550.000.000,00	1	550.000.000,00	1	580.000.000,00	1	600.000.000,00			
	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Laporan	0	0		1		1		1		1				





BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Dokumen	0	0		1		1		1		1			
3.29.02.1.01.0001 - Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah					-		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terkumpulnya dan Terolahnya Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Dokumen	0	0	-	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
3.29.02.1.01.0002 - Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah					-		250.000.000,00		250.000.000,00		280.000.000,00		300.000.000,00		
Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi	Dokumen	2	0	-	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	280.000.000,00	1	300.000.000,00		
3.29.02.1.01.0003 - Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah					-		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terkendalinya dan Terawasinya Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Laporan	0	0	-	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
3.29.02.1.03 - Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi							67.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		





BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Laporan	1	1	67.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
3.29.02.1.03.0003 - Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah					67.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terkendalinya dan Terawasinya Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Laporan	1	1	67.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
3.29.03 - PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA					90.000.000,00		800.000.000,00		850.000.000,00		900.000.000,00		950.000.000,00		
Meningkatnya Tata Kelola Mineral dan Batubara	Jumlah Rekomendasi terhadap Usulan IPR	Unit	0	10	90.000.000,00	10	800.000.000,00	10	850.000.000,00	10	900.000.000,00	10	950.000.000,00	2.07.3.29.3.3 2.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi	
3.29.03.1.01 - Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil					90.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut	Laporan	1	1	90.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		





BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	sampai dengan 12 Mil														
3.29.03.1.01.0003 - Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil					90.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Laporan	1	1	90.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
3.29.03.1.03 - Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					-		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		





BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Dokumen	73	0	-	15	350.000.000,00	15	350.000.000,00	15	350.000.000,00	15	350.000.000,00		
3.29.03.1.03.0003 - Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					-		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		
Tersusunnya Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan	Dokumen	73	0	-	15	350.000.000,00	15	350.000.000,00	15	350.000.000,00	15	350.000.000,00		





BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KET	
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
	Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut															
3.29.03.1.04 - Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat					-		250.000.000,00		300.000.000,00		350.000.000,00		400.000.000,00			
Terlaksananya Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah Dokumen Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat	Dokumen	0	0	-	10	250.000.000,00	10	300.000.000,00	10	350.000.000,00	10	400.000.000,00			
3.29.03.1.04.0010 - Penyusunan Dokumen Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat					-		250.000.000,00		300.000.000,00		350.000.000,00		400.000.000,00			
Terlaksananya Penyusunan Dokumen Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah Dokumen Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat	Dokumen	0	0	-	10	250.000.000,00	10	300.000.000,00	10	350.000.000,00	10	400.000.000,00			
3.29.05 - PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN					85.280.000,00		885.000.000,00		790.000.000,00		795.000.000,00		800.000.000,00			
Meningkatnya tata kelola energi baru terbarukan	Porsi EBT dalam Bauran Energi	%	12.35	15.4	85.280.000,00	16.38	885.000.000,00	17.39	790.000.000,00	18.34	795.000.000,00	19.32	800.000.000,00	2.07.3.29.3.3 2.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi		





BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET	
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
3.29.05.1.01 - Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil Diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan					-		50.000.000,00			-		-		-		
Terlaksananya Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas dan/atau Ke Arah Perairan Kepulauan	Dokumen	0	0	-	1	50.000.000,00	0	-	0	-	0	-			
3.29.05.1.01.0002 - Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan					-		50.000.000,00			-		-		-		





BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Tersusunnya Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas dan/atau Ke Arah Perairan Kepulauan	Jumlah Dokumen rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas dan/atau Ke Arah Perairan Kepulauan	Dokumen	0	0	-	1	50.000.000,00	0	-	0	-	0	-		
3.29.05.1.03 - Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun					-		50.000.000,00		-		-		-		
Terlaksananya Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel)	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Dokumen	0	0	-	1	50.000.000,00	0	-	0	-	0	-		





BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET	
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
3.29.05.1.03.0002 - Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun					-		50.000.000,00				-					
Tersusunnya Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Dokumen	0	0	-	1	50.000.000,00	0	-	0	-	0	-			
3.29.05.1.05 - Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi					-		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00			
Tersedianya Data Potensi Biomassa	jumlah dokumen data potensi biomassa	Dokumen	0	0	-	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00			
3.29.05.1.05.0001 - Penyusunan dan pemuktahiran data potensi biomassa					-		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00			
terkumpulnya data potensi biomassa	jumlah dokumen data potensi biomassa	Dokumen	0	0	-	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00			
3.29.05.1.07 - Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi							35.280.000,00		335.000.000,00		340.000.000,00		345.000.000,00			





BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Terlaksananya Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Jumlah dokumen data potensi aneka EBT di daerah	Dokumen	1	0	35.280.000,00	1	335.000.000,00	1	340.000.000,00	1	345.000.000,00	1	350.000.000,00		
	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	Laporan	1	1		1		1		1		1			
3.29.05.1.07.0002 - Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah					35.280.000,00		85.000.000,00		90.000.000,00		95.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	Laporan	1	1	35.280.000,00	1	85.000.000,00	1	90.000.000,00	1	95.000.000,00	1	100.000.000,00		
3.29.05.1.07.0010 - Penyusunan dan pemutakhiran data potensi aneka EBT di daerah					-		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Terlaksananya data potensi aneka EBT di daerah	Jumlah dokumen data potensi aneka EBT di daerah	Dokumen	1	0	-	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00		
3.29.05.1.08 - Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi					50.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Konservasi Energi	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya	Laporan	1	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		





BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	dikeluarkan oleh daerah provinsi														
3.29.05.1.08.0005 - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi					50.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Laporan	1	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
3.29.05.1.10 - Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi					-		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	Laporan	0	0	-	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
3.29.05.1.10.0002 - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota					-		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		





BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KET
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan Konservasi Energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	Laporan	0	0	-	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
3.29.06 - PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN					312.387.000,00		1.084.800.000,00		1.133.600.000,00		1.182.400.000,00		1.231.200.000,00		
Meningkatnya Cakupan Pelayanan Kelistrikan	Persentase jumlah Rumah tangga sasaran yang mendapat sambungan listrik	%	49.17	60.96	312.387.000,00	70.72	1.084.800.000,00	80.48	1.133.600.000,00	90.24	1.182.400.000,00	100	1.231.200.000,00	2.07.3.29.3.3 2.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi	
3.29.06.1.02 - Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi					23.095.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		90.000.000,00		
Terlaksananya penatausahaan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi	Jumlah Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi yang Ditetapkan	Dokumen	2	2	23.095.000,00	2	60.000.000,00	2	70.000.000,00	2	80.000.000,00	2	90.000.000,00		
3.29.06.1.02.0001 - Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi					23.095.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		90.000.000,00		
Terlaksananya Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi yang Ditetapkan	Dokumen	2	2	23.095.000,00	2	60.000.000,00	2	70.000.000,00	2	80.000.000,00	2	90.000.000,00		





BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET	
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
3.29.06.1.05 - Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri					-		60.000.000,00			70.000.000,00		80.000.000,00		90.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik	Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	Dokumen	5	0	-	2	60.000.000,00	2	70.000.000,00	2	80.000.000,00	2	90.000.000,00			
3.29.06.1.05.0002 - Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri					-		60.000.000,00			70.000.000,00		80.000.000,00		90.000.000,00		
Terlaksananya Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	Dokumen	5	0	-	2	60.000.000,00	2	70.000.000,00	2	80.000.000,00	2	90.000.000,00			





BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.29.06.1.06 - Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan					289.292.000,00		964.800.000,00		993.600.000,00		1.022.400.000,00		1.051.200.000,00		
Terlaksananya Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Keluarga	1451	60	289.292.000,00	288	964.800.000,00	288	993.600.000,00	288	1.022.400.000,00	288	1.051.200.000,00		
3.29.06.1.06.0002 - Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu					289.292.000,00		964.800.000,00		993.600.000,00		1.022.400.000,00		1.051.200.000,00		
Terlaksananya Penetapan Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Keluarga	1451	60	289.292.000,00	288	964.800.000,00	288	993.600.000,00	288	1.022.400.000,00	288	1.051.200.000,00		
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					200.000.000,00		375.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		
3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					100.000.000,00		175.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang	%	0	14.85	100.000.000,00	35.9	175.000.000,00	47.48	200.000.000,00	78.78	200.000.000,00	100	200.000.000,00	2.07.3.29.3.3 2.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi	
3.32.03.1.01 - Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					100.000.000,00		175.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		





BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Terlaksananya penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Laporan	0	1	100.000.000,00	1	175.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
3.32.03.1.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					100.000.000,00		175.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Laporan	0	1	100.000.000,00	1	175.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
3.32.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI					100.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan	%	0	18.87	100.000.000,00	37.74	200.000.000,00	61.01	200.000.000,00	79.25	200.000.000,00	100	200.000.000,00	2.07.3.29.3.3 2.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi	
3.32.04.1.01 - Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pematapan					100.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pematapan	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur	Satuan Permukiman	0	1	100.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		





BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan														
3.32.04.1.01.0002 - Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman					100.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terwujudnya Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Pemantapan Satuan Permukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	Satuan Permukiman	0	1	100.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		



4.4. Subkegiatan yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Adapun subkegiatan prioritas yang mendukung program prioritas daerah sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 4.4

Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
2.07.3.29.3.32.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi				
1.	2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan kerja	2.07.03.1.01 - Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	
			2.07.03.1.01.0001 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	
			2.07.03.1.04 - Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	
			2.07.03.1.04.0001 - Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	
2.	2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	2.07.04.1.01 - Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
			2.07.04.1.01.0005 - Perluasan Kesempatan Kerja	
			2.07.04.1.01.0006 - Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	
			2.07.04.1.03 - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	
			2.07.04.1.03.0003 - Job Fair/Bursa Kerja	
3.	2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Meningkatnya Pekerja yang Terlindungi	2.07.05.1.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	
			2.07.05.1.02.0002 - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	
			2.07.05.1.03 - Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK),	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			dan Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota (UMSK)	
			2.07.05.1.03.0005 - Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	
4.	2.07.06 - PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Terlindunginya hak-hak pekerja	2.07.06.1.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	
			2.07.06.1.01.0001 - Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	
5.	3.29.03 - PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Meningkatnya Tata Kelola Mineral dan Batubara	3.29.03.1.04 - Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	
			3.29.03.1.04.0010 - Penyusunan Dokumen Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat	
6.	3.29.06 - PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Kelistrikan	3.29.06.1.06 - Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	
			3.29.06.1.06.0002 - Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	
7.	3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi	3.32.03.1.01 - Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
			3.32.03.1.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	

4.5. Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan, inklusif dan berdaya saing, Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo telah menetapkan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta target untuk tahun 2025 sampai dengan 2030 sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama
Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	2.07.3.29.3.32.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi									
1.	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	52,12	52,93	53,74	54,54	55,35	56,16	56,97	
2.	Rasio Elektrifikasi	%	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	
3.	Persentase Dukungan Kegiatan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan di Kawasan Transmigrasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Jumlah Rumah Tangga Sasaran yang terpenuhi kebutuhan Listrik	Rumah Tangga Sasaran (RTS)	1.451	60	288	288	288	288	288	
5.	Persentase peningkatan jumlah serapan tenaga kerja	%	24,23	24,5	24,75	25	25,25	25,5	25,75	
6.	Persentase Usaha Tambang Sesuai Provinsi Kewenangan yang Tidak Melanggar	%	100	100	100	100	100	100	100	

4.6. Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator turunan yang digunakan untuk mengukur aspek-aspek operasional dan teknis dari pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja, Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Transmigrasi. IKK berperan penting dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), serta menjadi alat pemantauan terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan dan program yang dijalankan oleh masing-masing bidang.

Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo telah menentukan target penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan, energi sumber daya mineral dan transmigrasi melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana tabel di bawah ini :



Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci
Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA										
1	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	positif	%	52.12	52.93	53.74	54.54	55.35	56.16	56.97	
2	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenaga kerjaan	kumulatif	%	5.45	5.55	5.65	5.75	5.85	5.95	6.05	
3	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase peningkatan jumlah serapan tenaga kerja	positif	%	24.23	24.50	24.75	25	25.25	25.50	25.75	
5	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog social	kumulatif	Orang	20.969	21.169	21.369	21.569	21.769	21.969	22.169	
6	Jumlah Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya	kumulatif	Orang	20.969	21.169	21.369	21.569	21.769	21.969	22.169	
7	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	kumulatif	%	16.67	0	0	33.33	66.66	100	100	
8	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan dalam negeri hasil pelatihan kerja	positif	%	36.77	50	50	50	50	50	50	



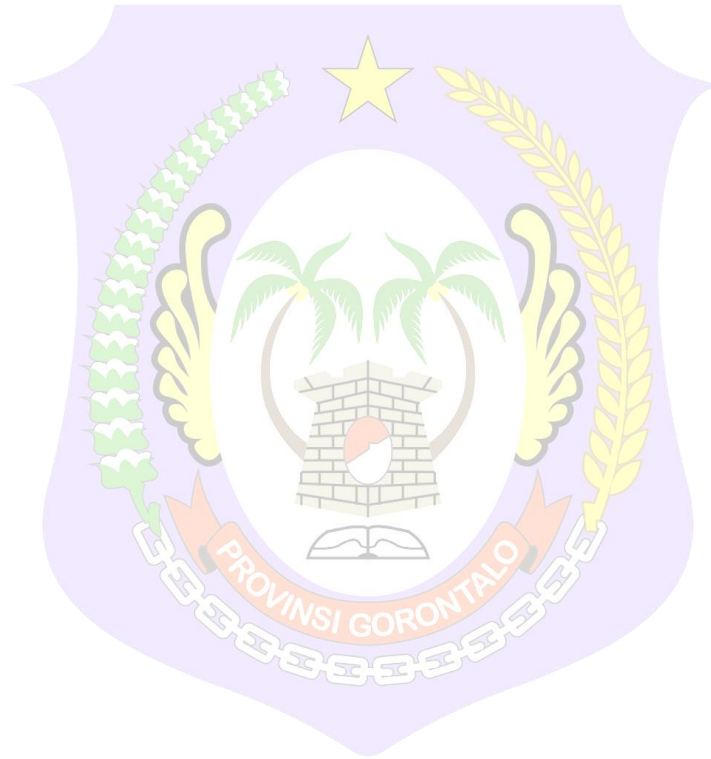


NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
9	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	positif	%	55.60	55.60	55.60	55.60	55.60	55.60	55.60	
	3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL										
10	Rasio Elektrifikasi	positif	%	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	
11	Jumlah Rumah Tangga Sasaran yang terpenuhi kebutuhan Listrik	positif	Rumah Tangga Sasaran (RTS)	1451	60	288	288	288	288	288	
12	Persentase Usaha Tambang Sesuai Provinsi Kewenangan yang Tidak Melanggar	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
13	Persentase jumlah Rumah tangga sasaran yang mendapat sambungan Listrik	kumulatif	%	49.17	51.20	60.96	70.72	80.48	90.24	100	
14	Porsi EBT dalam Bauran Energi	kumulatif	%	12.35	13.58	15.4	16.38	17.39	18.34	19.32	
15	Luas Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota	positif	Meter	715	0	59	35	75	433	112	
16	Jumlah Rekomendasi terhadap Usulan IPR	positif	Unit	0	0	10	10	10	10	10	
	3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI										
17	Persentase Dukungan Kegiatan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan di Kawasan Transmigrasi	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
18	Jumlah kawasan transmigrasi yang dikembangkan	positif	Kawasan	1	1	1	1	1	1	1	
19	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang	kumulatif	%	0	0	14.85	35.9	47.48	78.78	100	





NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
20	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan	kumulatif	%	0	0	18.87	37.74	61.01	79.25	100	





BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen Perencanaan yang disusun sebagai pedoman arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sektor ketenagakerjaan, energi dan sumber daya mineral, serta transmigrasi selama lima tahun ke depan. Dokumen ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 serta selaras dengan kebijakan nasional.

Melalui Renstra ini, diharapkan seluruh jajaran Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo memiliki komitmen yang kuat dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel, guna mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan dan berdaya saing.

Renstra ini juga menjadi dasar evaluasi kinerja serta alat kontrol dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah dibidang ketenagakerjaan, ESDM dan Transmigrasi. Pelaksanaannya membutuhkan sinergi dan kolaborasi yang erat antar pemangku kepentingan, baik di tingkat daerah, nasional maupun masyarakat luas.

Akhirnya, semoga dokumen ini dapat menjadi instrumen strategis dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Provinsi Gorontalo

